

**PROSES PENGAMBILAN KEBIJAKAN UPAYA PENYATUAN
TIONGKOK-TAIWAN DI ERA PEMERINTAHAN XI JINPING**

(2020 -2024)

SKRIPSI



**UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA**

Oleh:

MUHAMMAD FAHDANI RIYANTAMA

21323251

PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS ILMU SOSIAL BUDAYA

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2025

**PROSES PENGAMBILAN KEBIJAKAN UPAYA PENYATUAN TIONGKOK-
TAIWAN DI ERA PEMERINTAHAN XI JINPING**

(2020-2024)

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi sebagian dari syarat guna memperoleh

Derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional



Oleh:

MUHAMMAD FAHDANI RIYANTAMA

21323251

PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS ILMU SOSIAL BUDAYA

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2025

HALAMAN PENGESAHAN

PROSES PENGAMBILAN KEBIJAKAN UPAYA PENYATUAN TIONGKOK- TAIWAN DI ERA PEMERINTAHAN XI JINPING (2020-2024)

Dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi Prodi Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat dalam memperoleh
derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional



Mengesahkan

Program Studi Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia



Ketua Program Studi

Karina

Karina Utami Dewi, S.I.P., M.A.

Dewan Penguji

1. Ayu Heryati Naqsabandiyah, S.IP., M.A.
2. Masitoh Nur Rohma, S.Hub.Int., M.A.
3. Irawan Jati, S.IP., M.Hum., M.S.S., Ph.D.

Tanda Tangan

[Three handwritten signatures]

PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil karya ilmiah independen saya sendiri, dan bahwa semua materi dari karya orang lain (dalam buku, artikel, esai, disertasi, dan di internet) telah dinyatakan, serta kutipan dan parafrase diindikasikan dengan jelas.

Tidak ada materi selain yang digunakan selain yang termuat. Saya telah membaca dan memahami peraturan dan prosedur universitas terkait plagiarisme.

Memberikan pernyataan yang tidak benar dianggap sebagai pelanggaran integritas akademik.

Selasa, 2 Juli 2024



MUHAMMAD FAHDANI RIYANTAMA

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah mengizinkan saya dengan rahmat dan hidahnya serta karunia kesehatan yang diberikan sehingga saya mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat serta salam tidak luput penulis lontarkan kepada baginda besar Nabi Muhammad Saw sebagai tokoh pembawa peradaban bagi umat muslim dan manusia di seluruh alam. Adapun skripsi ini berjudul “Proses Pengambilan Kebijakan Upaya Penyatuan Tiongkok-Taiwan di Era Pemerintah Xi Jinping (2020-2024)” disusun sebagai syarat kelulusan mahasiswa strata tingkat 1 untuk memperoleh gelar sarjana di Program Studi Hubungan Internasional Universitas Islam Indonesia.

Dalam proses penyelesaian skripsi ini, penulis tidak lepas dari berbagai bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan beberapa ucapan terima kasih kepada :

1. Allah SWT yang telah memberikan nikmat kesehatan, keberkahan ilmu dan kemudahan kepada penulis selama menyusun skripsi ini.
2. Kepada seluruh dosen Hubungan Internasional terutama Miss Ayu Heryati Naqsabandiyah, S.IP., M.A. yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis sehingga mampu menyusun skripsi ini hingga selesai.
3. Ibu Karina Utami Dewi, SIP.,MA. selaku Kaprodi Hubungan Internasional Universitas Islam Indonesia.
4. Dosen-dosen favorit saya selama menempuh perkuliahan dari semester 1 sampai semester 6, Miss Masitoh, Miss Gustrieni, Miss Alfreda, Miss Karin, Mr Hasbi, Mr Enggar, Mr Ganjar, Mr Hadza, & Mr Giri, terima kasih atas ilmu yang sangat bermanfaat yang diberikan selama perkuliahan sehingga mampu memberikan pengetahuan yang berharga terhadap penulis & semoga kelak apa yang diberikan menjadi ladang amal di akhirat kelak.
5. Keluarga penulis Bapak, Mami, Henny Aisyah, S.Pd., M.Sc., & Afiqah Trie W. yang ada di kota Batam terima kasih doa-doa serta dukungan yang kalian panjatkan menjadi penyemangat untuk penulis sampai di titik ini.
6. Sahabat seperjuangan badminton Rabu pagi (Surya, Hakim, Abimastra, Dzikri, Derry, Erlan, Difa, zayyan) terima kasih sudah mengisi masa perkuliahan penulis sampai selesai.
7. Untuk Teman teman DPM UII Komisi 2, BKSAJ, & Badan Legislasi DPM FPSB UII, terima kasih atas pengalaman dan ilmu yang bermanfaat selama organisasi & kepanitiaan.
8. Untuk teman teman HMI UII terima kasih atas dukungan, doa-doa dan pertemanan yang mendukung penulis dalam menyelesaikan studi di Universitas Islam Indonesia
9. Untuk pelatih spesial saya Sabeum Nim Maklon Hatti & teman-teman team Taekwondo Black Eagle camp terima kasih sudah menemani dan

memberikan semangat dari awal perkuliahan sampai penyelesaian tugas akhir ini.

10. Rekan- Rekan magang dan pegawai Kantor Imigrasi kelas 1 TPI Yogyakarta terutama divisi LANTASKIM, terima kasih atas ilmu , pengalaman & pelajaran serta suasana kekeluargaan yang menemani penulis selama magang dan menyusun skripsi.
11. Dan yang terakhir untuk diri saya sendiri, terima kasih sudah bangkit setelah gagal dalam seleksi akademi abdi negara dan mampu sampai berada di titik yang luar biasa ini, you're the best.

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR GRAFIK.....	ix
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR SINGKATAN.....	xi
ABSTRACT	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	9
1.3 Tujuan Penelitian	10
1.4 Cakupan penelitian.....	10
1.5 Tinjauan Pustaka	11
1.6 Kerangka Pemikiran.....	13
1.7 Argumen Sementara	15
1.8 Metode Penelitian	16
1.8.1 Jenis Penelitian	16
1.8.2 Subjek dan Objek Penelitian	17
1.8.3 Metode Pengumpulan Data	17
1.8.4 Proses Penelitian	17
1.9 Sistematika Pembahasan.....	18
BAB 2 FAKTOR <i>INTERNAL, SOCIAL STRUCTURE & BEHAVIOR</i>	20
2.1 Faktor Internal	20
2.1.1 Non Human Environment	21
2.1.2 Society	25
2.1.3 Human Environment.....	30
2.2 Faktor Social Structure and Behavior	40
2.2.1 Major Common Value Orientation	41
2.2.2 Major Institutional Patterns.....	42
2.2.3 Major Characteristic of Social Organization	47
2.2.4 Role Differentiation and Specialization	48

2.2.5 Groups: Kinds and Functions	50
BAB 3 EKSTERNAL	53
3.1 Faktor Eksternal	53
3.1.1 Non Human Environment	53
3.1.2 Other Cultures	56
3.1.3 Other Societies.....	60
3.1.4 Societies Organized and Functioning as States Government Action.....	66
BAB 4 KESIMPULAN REKOMENDASI & ANALISIS KEBIJAKAN	78
4.1 Kesimpulan	78
4.2 Rekomendasi.....	79
DAFTAR PUSTAKA	80

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Tabel Analisis Teori Kebijakan	74
---	----

DAFTAR GRAFIK

Grafik 2. 1 Grafik 2. 1 Opini Publik Terhadap Isu Reunifikasi Berbasis Kertas.	28
Grafik 2. 2 Grafik 2. 2 Opini PublikTiongkok Terhadap Isu Reunifikasi Berbasis Kertas Online.....	30
Grafik 3. 1 Tren Penentangan Publik Taiwan Terhadap Isu Reunifikasi	61
Grafik 3. 2 Tren Penentangan Publik Taiwan Terhadap Isu Reunifikasi	64
Grafik 3. 3 Opini Publik Taiwan Terhadap Isu Reunifikasi di Era Presiden	66
Grafik 3. 4 Opini Publik Taiwan Terhadap Isu Reunifikasi di	68

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Aksi Provokasi Tiongkok Terhadap Wilayah Taiwan.....	9
Gambar 1. 2 Kerangka Teori Decision Making	14
Gambar 2. 1 Zona Strategis Taiwan yang Menjadi Tujuan Politik Tiongkok	23
Gambar 2. 2 Struktur Tingkat Pusat Partai Komunis Tiongkok	46
Gambar 3. 1 Bagan Teori Decision Making Model.....	73

DAFTAR SINGKATAN

AS	: Amerika Serikat
AIT	: American Institute in Taiwan
CPAD	: China Association for Promoting Democracy
CDL	: China Democratic League
CDNCA	: China Democratic National Construction Association
CLGFEA	: Central Leading Group for Financial and Economic Affairs
CLGFA	: Central Leading Group for Foreign Affairs
CLGTA	: Central Leading Group for Taiwan Affairs
CCDI	: Central Commission for Discipline Inspection
CPWD	: China Peasant's for Discipline Inspection
DPP	: Democratic Progressive Party
DOS	: United States Department of States
ECFA	: Cross-Strait Economic Cooperation Framework Agreement
KMT	: Kuomintang
OCP	: One China Policy
PBSC	: Politburo Standing Committee
PBB	: Perserikatan Bangsa-Bangsa
PKT	: Partai Komunis Tiongkok
PLA	: People's Liberation Army
PZGT	: China Zhi Gong Party
PROC	: People's Republic of China
RCCK	: Revolutionary Committee of the Kuomintang
RRT	: Republik Rakyat Tiongkok
TDSL	: Taiwan Democratic Self-Government League
TRA	: Taiwan Relations Act

TTP : Taiwan People's Party

UFWD : United Front Department Work

UU : Undan-Undang

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis proses pengambilan kebijakan Tiongkok terkait upaya penyatuan kembali dengan Otoritas Taiwan di era pemerintahan Presiden Xi Jinping, khususnya pada periode 2020-2024. Isu Taiwan menjadi prioritas sentral dalam agenda bersejarah Partai Komunis Tiongkok (PKT), dengan adanya dukungan masyarakat dan tekanan yang meningkat dalam lingkungan partai internal. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan proses pengambilan kebijakan pemerintah Tiongkok di bawah Xi Jinping dalam meningkatkan upaya penyatuan kembali Tiongkok-Taiwan (2020-2024). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui beberapa sumber yang relevan. Adapun faktor internal, social structure & behavior, dan eksternal yang terbagi ke dalam beberapa elemen. Kesimpulan dari faktor internal adanya dampak dari penjajahan Jepang yang memisahkan Otoritas Taiwan dari Tiongkok, sehingga menimbulkan perbedaan identitas antara kedua wilayah yang menciptakan konflik. Sedangkan dari faktor social structure & behavior adanya sifat nasionalisme, ideologi negara yang membangun dukungan rakyat dan elit untuk memperkuat legitimasi & pembentukan kebijakan. Dari eksternal terbentuknya kebudayaan lain di Taiwan & intervensi AS yang menjadi ancaman bagi kedaulatan Tiongkok memperkuat legitimasi kebijakan penyatuan untuk menegakkan prinsip Satu Tiongkok.

Kata-Kata Kunci: Proses pengambilan kebijakan, Penyatuan kembali, Tiongkok, Taiwan, konflik

ABSTRACT

This research analyzes the China's policy-making process regarding reunification efforts with the Taiwan Authority under President Xi Jinping, particularly in the 2020-2024 period. The Taiwan issue has become a central priority on the CCP's historic agenda, with public support and pressure mounting within the party. This research aims to explain the Chinese government's policy-making process under Xi Jinping in enhancing China-Taiwan reunification efforts (2020-2024). This research uses a qualitative approach through several relevant sources. The internal, social structure & behavior and external factors are divided into several elements. The conclusion of the internal factors is the impact of the Japanese colonization that separated the Taiwan Authority from China, resulting in differences in identity between the two regions that created conflict. From the social structure & behavior factors, there is the nature of nationalism, state ideology that builds popular and elite support to strengthen legitimacy & policy formation. Externally, the formation of other cultures in Taiwan & US intervention which is a threat to Chinese sovereignty strengthened the legitimacy of the unification policy to uphold the One China principle.

Keywords: Policy-making process, Reunification, China, Taiwan, Conflict

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tiongkok dan Otoritas Taiwan merupakan negara maju dan wilayah otoritas de facto yang terletak di kawasan Asia Timur. Tiongkok dan Otoritas Taiwan terpisah pada tahun 1949 akibat adanya perbedaan ideologi yang menciptakan perang saudara di antara kedua partai dalam memperebutkan kekosongan pemerintahan setelah runtuhnya Dinasti Qing dan kekuasaan Jepang (WICAKSONO, 2021, 605-612). Setelah mengalami 2 kali pertempuran, pada fase pertempuran kedua partai Kuomintang (KMT) harus mengakui kekalahannya akibat kekurangan pasukan dan kekuatan persenjataan yang banyak di tawan oleh Partai Komunis Tiongkok (PKT), pasukan dan pejuang KMT harus bergeser ke pulau Formosa di Selat Taiwan Selatan ketika PKT berhasil menguasai daratan Tiongkok (WICAKSONO, 2021, 588-738).

Chiang Kai-sek mendirikan pemerintahan pengungsi Republik Tiongkok dan menjadikan dirinya sebagai presiden sampai akhir hayatnya pada 1975. Mao Zedong yang menjadi pemimpin Tiongkok memiliki ambisi untuk memberantas sisa-sisa pengikut nasionalis sampai ke Taiwan dan telah memerintahkan People's Liberation Army (PLA) untuk menyiapkan strategi dalam rencana pembersihannya ke Taiwan, akan tetapi dengan adanya perang Korea yang pecah pada tahun 1950 menghambat tujuan

Mao dan kemudian rencana ini ditinggalkan akibat adanya kewajiban Tiongkok dalam mendukung perang penyatuan Korea (Easton 2020).

Di era kepemimpinan Mao Tiongkok berupaya untuk mendapatkan pengakuan internasional melalui forum organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) serta berupaya memperoleh klaim yang sah sebagai negara satu satunya mewakili Tiongkok. Pada tahun 1971 PBB akhirnya mengakui Tiongkok daratan sebagai negara yang sah dan layak mengakui seluruh Tiongkok serta menanggalkan keanggotaan Taiwan sebagai negara perwakilan Tiongkok. Sejak tahun 1949 Tiongkok merilis kebijakan One China Policy (OCP). OCP merupakan kebijakan yang dirancang Tiongkok yang berlaku untuk negara-negara internasional agar mereka mau mematuhi dan mengakui, bahwa Tiongkok hanya ada satu yaitu Republik Rakyat Tiongkok (RRT) dan wilayah seperti Hongkong, Makau, & Taiwan merupakan wilayah yang berada di bawah naungan Tiongkok tanpa terkecuali (Goldstein 2023).

Deng Xiaoping (1978-1990), yang menjadi pemimpin non formal Tiongkok merilis kebijakan strategis di antaranya “Satu Negara, Dua Sistem”, Reunifikasi secara damai, & Dasar konstitusional wilayah istimewa Hongkong, Makau, & Taiwan. Lalu pada tahun 1979 di bawah kepemimpinan Deng kebijakan OCP semakin diperkuat terutama ketika Amerika Serikat (AS) berusaha untuk memperoleh hubungan diplomatiknya dengan Tiongkok dan menormalisasikan hubungan kedua negara ini serta

berkomitmen untuk memutuskan hubungan resminya dengan Taiwan (Duyuan 2021).

Sejak tahun 1949 penyatuan kembali menjadi agenda penting PKT dan pemimpin Tiongkok berikutnya. Di era kepemimpinan Liu Shaoqi (1959-1968), Tiongkok masih sibuk memperbaiki sistem pemerintahan namun tetap memegang prinsip dan klaim tegas Taiwan merupakan bagian dari Tiongkok. Pada bulan Maret 1955, dalam konferensi partai nasional Tiongkok di Beijing, Liu mengatakan bahwa pembebasan rakyat Taiwan sama seperti pembebasan Xinjiang & Tibet, akan tetapi pembebasan Penghu & Taiwan yang rumit karena terdapat pasukan AS yang menghalang diplomasi. Liu juga menekankan penggunaan militer jika kondisi darurat yang mendesak situasi Tiongkok, gagasan ini dirancang oleh Liu dan Zhou Enlai (National History Network of the People's Republic of China 2017).

Di era kepemimpinan Li Xiannian (1983-1988), Tiongkok mulai melakukan pengembangan hubungan diplomatiknya sejak menormalisasikan hubungan dengan AS yang menghasilkan hubungan diplomatik kedua sisi Selat Taiwan dalam bidang ekonomi, perdagangan, ilmu pengetahuan, & pertukaran budaya pada tahun 1991. Li menekankan upaya penyatuan secara damai & berharap Taiwan segera membuat keputusan atas tawaran kerja sama kepada Tiongkok. Li hanya mengecam tindakan separatis namun tidak melancarkan tekanan dan operasi militer terhadap Taiwan (Taiwan Affairs Office of the CPC Central Committee & State Council 1992). Di era kepemimpinan Yang Shangkun (1988-

1993), dinamika hubungan Tiongkok & Taiwan berjalan lebih intens dalam sistem dialog kedua sisi Selat Taiwan. Upaya untuk melakukan reunifikasi berjalan secara damai Yang menggunakan strategi *soft diplomacy* dengan menjalin hubungan yang damai serta dialog yang lebih intens kepada pejabat dan tokoh patriotik yang berada di Taiwan, Hongkong & Makau. Hal ini dibuktikan dengan adanya pertemuan Yang dengan Huang Zhaosong (pemimpin redaksi *China Times*) pada 24 September 1990, Yang melakukan dialog dan mencoba membawa pesan bahwa penyatuan kembali merupakan tren umum dan keinginan seluruh rakyat Tiongkok (Yang Yangon and Yang Shangkun's Hometown Scenic Area 1991).

Kepemimpinan Tiongkok di bawah Jiang Zemin (1993-2003), terhadap dinamika hubungan dengan Taiwan mengalami perkembangan baru yang mana Jiang Zemin memperkaya penegasan prinsip Satu Tiongkok, mengembangkan isi, metode & langkah negosiasi perdamaian, memperdalam makna kontemporer baru dari pertukaran ekonomi dan budaya lintas selat, menekankan gagasan “Menaruh harapan pada rakyat Taiwan” serta mengeluarkan delapan poin penguatan utama terhadap upaya penyatuan Taiwan. Namun pada tanggal 3 September 1995, ketegangan dimulai akibat adanya kunjungan pribadi Presiden Taiwan Lee Teng-Hui ke Universitas Cornell di AS (Part History and Literature Research Institute of the CPC Central Committee 2015). Kunjungan Lee pada saat itu meminta nasihat AS dalam menghadapi provokasi Tiongkok terhadap upaya reunifikasi dan

mengusulkan “Teori Dua Negara” yang diterapkan pada tahun 2000. Jiang menilai tindakan ini merupakan provokasi Taiwan dan kecerobohan AS yang mengizinkan Lee untuk berkunjung ke AS. Di tanggal dan tahun yang sama dalam pidato perayaan kemenangan 50 tahun melawan Jepang & Fasisme. Jiang mengungkapkan bahwa tindakan separatisme dan kemerdekaan Taiwan harus di tuntaskan. Pada tanggal 8 September 1995, Jiang mengunjungi AS dan bertemu dengan Presiden Bush. Jiang menegaskan bahwa AS harus mengutamakan prinsip Komunike Tiongkok-AS dan urusan Taiwan merupakan urusan dalam negeri Tiongkok yang harus di selesaikan. Selain itu Tiongkok juga mengeluarkan *Second White Paper* pada tahun 2002, yang berisi Tiongkok akan menggunakan kekuatan militer jika Taiwan menolak untuk negosiasi dengan jalan damai (Part History and Literature Research Institute of the CPC Central Committee 2015).

Di era pemerintahan Presiden Hu Jintao (2003-2013), upaya penyatuan Taiwan kembali dijalankan namun agenda yang dilakukan oleh Jintao dalam melakukan upayanya terhadap hubungan lintas selat lebih mengedepankan pendekatan lunak dengan menjalankan kerja sama ekonomi dan melalui dialog, serta cara yang damai guna membujuk Taiwan untuk mau bergabung dengan daratan. Selain itu Jintao juga merilis program kerja yang disebut sebagai “Enam Proposal” yang isinya mencakup perbaikan hubungan Tiongkok-Taiwan melalui jalur selat untuk melancarkan kerja sama ekonomi, sosial, & membuka jalur dialog untuk menciptakan ketergantungan ekonomi Taiwan terhadap Tiongkok

yang bertujuan untuk melunakkan Taiwan terhadap upaya penyatuan (Wulandari 2016, 46-98).

Di era pemerintahan Xi Jinping (2013- Sekarang) Tiongkok kembali menerapkan pendekatan yang berbeda terhadap Taiwan. Berbeda dengan pemimpin sebelumnya yang lebih hati-hati dalam pendekatan terhadap Taiwan Xi Jinping melakukan pendekatan yang lebih tegas dalam menghadapi masalah Taiwan yang belum bersatu dengan Tiongkok. Sikap tegas Xi mulai dilakukan ketika Taiwan menolak perundingan upaya Tiongkok dalam proses penyatuan kembali secara damai di bawah kepemimpinan Presiden Tsai (VOA 2024). Bagi Tiongkok Otoritas Taiwan merupakan bagian dari wilayahnya yang memisahkan diri akibat adanya pengaruh kelompok separatist & intervensi asing di wilayah tersebut. Sehingga pada tahun 2022 pemerintahan Tiongkok di bawah Xi kembali merilis buku putih sebagai upaya pengembalian Taiwan pada 10 Agustus 2022, yang menjelaskan upaya Tiongkok untuk menyelesaikan masalah penyatuan Tiongkok di era baru. Selain itu juga berdasarkan isi dari buku putih Tiongkok secara tegas menolak adanya intervensi asing dan penyatuan kembali merupakan langkah terakhir yang dilakukan PKT untuk mewujudkan kebangkitan nasional bangsa Tiongkok (News Agency Xinhua 2022).

Pada tahun 2020 tercatat bahwa pesawat tempur milik angkatan udara Tiongkok telah melakukan provokasi dengan cara memasuki wilayah pertahanan udara milik Taiwan tanpa izin otoritas setempat. Hal ini pun dinilai oleh kementerian pertahanan

Taiwan bahwa Tiongkok mengisyaratkan rasa tidak senang terhadap kedudukan Taiwan saat ini dan sebagai sebuah tekanan untuk menurunkan moral para prajurit Taiwan (VOA 2022). Provokasi ini pun terus berlanjut dan kembali terjadi pada tahun 2021 tepatnya pada tanggal 23 & 24 Januari, aktor utama yang memainkan catur provokasi ini dimainkan oleh peranan dari PLA sebagai upaya untuk memancing pihak Taiwan untuk melakukan perang secara kognitif sebagai respon PKT mengungkapkan keinginannya menguasai daerah otonomi Taiwan (Indo pacific defense forum 2021).

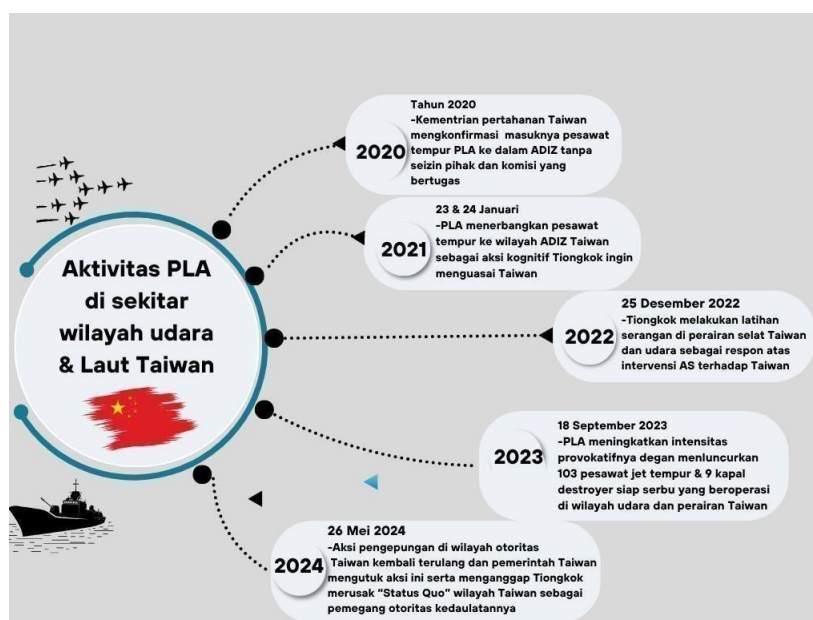
Pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2022, Tiongkok menggelar latihan serangan di wilayah perairan dan udara sebagai respon dari sikap provokasi Taiwan dan AS terhadap Tiongkok (medcom.id 2022). Lalu pada tanggal 18 September tahun 2023, Tiongkok meningkatkan kembali aksi provokatifnya melalui skala yang lebih tinggi dengan meluncurkan 103 jet tempur siap serbu dan juga 9 kapal perang Tiongkok yang beroperasi di wilayah kedaulatan udara dan laut Taiwan (Roza 2023, 1). Akhirnya pada tanggal 26 Mei 2024, aksi ini kembali terulang dengan sikap Taiwan yang mengutuk aksi Tiongkok yang melakukan latihan militer dan tindakan ini dianggap sebagai penghancur *status quo* Taiwan sebagai pemegang sah wilayah kedaulatannya (ROC-Taiwan.org 2024).

Xi telah menghapus kebijakan pembatasan masa jabatan Presiden Tiongkok dan mereformasi aturan dalam sistem pemerintahannya. Artinya dalam periode ketiga ambisinya dalam

melakukan penyatuan dan mewujudkan kebangkitan nasional Tiongkok akan semakin nyata. Sesuai dengan pidatonya pada malam tahun baru mendekati pemilihan Presiden Taiwan pada 13 Januari 2024, Xi menegaskan “Reunifikasi Taiwan tidak dapat diabaikan oleh Tiongkok” (Antara 2024).

Upaya penyatuan Tiongkok juga dibuktikan dengan adanya intervensi Tiongkok terhadap pemilu di Taiwan pada tahun 2020 & 2024. Presiden Tsai ing-Wen mengungkapkan bahwa Tiongkok selalu berupaya ikut campur dan mempengaruhi perannya dalam pemilu yang terjadi di Taiwan untuk mempengaruhi pandangan masyarakat terkait pemimpin Taiwan yang berasal dari Democratic Progressive Party (DPP) (VOA 2023). Intervensi ini dilakukan dengan cara melakukan kampanye terhadap rezim Tiongkok di Taiwan, menyebarkan informasi palsu untuk menciptakan pandangan buruk mengenai DPP, & propaganda penyatuan. Tsai ing-wen juga mengungkapkan bahwa Tiongkok di bawah rezim Xi Jinping saat ini lebih ambisius dan berusaha untuk mewujudkan tujuan politiknya dengan cara apapun (CNBC Indonesia 2023).

Gambar 1. 1 Aksi Provokasi Tiongkok Terhadap Wilayah Taiwan



(Sumber: VOA Indonesia 2022; Media Activity 2021; ROC Taiwan 2024; Medcom 2022; Roza 2023)

Selain itu upaya penyatuan juga dilakukan melalui tekanan politik terhadap Taiwan. Tiongkok berupaya melakukan isolasi pasokan dengan memberlakukan larangan impor mengenai produk pertanian, perikanan, & buah-buahan yang mulai diterapkan pada tahun 2021 (East Asia Froum 2022). Pada tahun 2023 & 2024, Tiongkok juga melakukan penaikan tarif terhadap ekspor Taiwan ke Tiongkok mengenai bahan kimia dan tekstil di bawah perjanjian Cross-Strait Economic Cooperation Framework Agremement (ECFA) (South China Morning Post 2024).

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana proses pengambilan kebijakan pemerintahan Tiongkok dalam meningkatkan upaya penyatuan Tiongkok-Taiwan di era pemerintahan Xi Jinping tahun (2020-2024)?

1.3 Tujuan Penelitian

Melalui pemaparan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan proses pengambilan kebijakan pemerintah Tiongkok di bawah Xi Jinping dalam meningkatkan upaya penyatuan Tiongkok-Taiwan (2020-2024).

1.4 Cakupan penelitian

Pada tahun 2020 Tiongkok mulai meningkatkan aksi provokatifnya dengan Taiwan akibat adanya ketidakpuasan Presiden Xi Jinping terhadap kebijakan nasionalis partai DPP di bawah Tsai ing-Wen yang secara tegas menolak tawaran penyatuan Tiongkok melalui “Konsensus 1992” dan penawaran solusi “Satu Negara, Dua Sistem” sebagai bentuk pemerintahan dengan cara melakukan tekanan politik dan operasi armada militer PLA di dekat wilayah otoritas Taiwan. Selain itu hubungan kedua negara ini memanas di tahun 2022 akibat adanya kunjungan DPR AS Nancy Pelosi ke Taiwan. Dalam Penelitian Taiwan sebagai pihak eksternal karena Otoritas Taiwan yang berada di luar zona pengambil keputusan. Tiongkok menganggap bahwa masuknya kebudayaan baru yang dinilai sebagai faktor yang mempengaruhi sikap publik Taiwan sehingga menimbulkan rasa ingin memisahkan diri akibat adanya budaya lain yang masuk ke Taiwan. Adanya rezim partai DPP saat ini yang berkuasa di Taiwan berusaha untuk memisahkan diri sehingga Taiwan menganggap mereka sebagai wilayah lain dari Tiongkok. Pada tahun 2023 Presiden Xi Jinping kembali terpilih sebagai pemimpin Tiongkok yang memperkuat legitimasi PKT untuk mengembalikan

Taiwan agar tidak sepenuhnya terpisah dan mempertahankan prinsip Satu Tiongkok (BBC News Indonesia 2020).

1.5 Tinjauan Pustaka

Perselisihan Tiongkok dan Taiwan mengenai solusi permasalahan lintas selat yang sampai saat ini belum selesai berubah menjadi dilema panjang dalam rentang waktu yang lama. Oleh karena itu sudah banyak peneliti atau pun pelajar yang meneliti topik yang fokus terhadap pembahasan mengenai dinamika hubungan politik dan konflik antara Tiongkok & Taiwan. Di dalam tulisan Dian Pertiwi, Aryana Fahira, & Vany Oktaviany menjelaskan bahwa adanya perebutan kekuasaan yang terjadi di Tiongkok setelah berhasil mengusir penjajahan Jepang yang berdampak terhadap perang saudara antara PKT & KMT. Dijelaskan juga bahwa dikeluarkannya OCP semakin menyudutkan Taiwan untuk memperoleh kemerdekaannya, dampak dari penetapan implikasi OCP terhadap Tiongkok akibat reaksi Taiwan yang menolak untuk melakukan perundingan (Pertiwi, Fahira, & Oktaviany 2021).

Di dalam tulisan Rizal Santoso & Windy Dermawan menjelaskan bahwa adanya upaya diplomasi publik yang dilakukan oleh Tiongkok dan Taiwan untuk memberantas masalah penyelundupan, sengketa hasil produksi & pemberantasan guna menjalin komunikasi yang intens terhadap lintas selat (Rizal Budi Santoso & Windy Dermawan 2021). Di dalam tulisan Prayudha Pubian Hajiansyah & Irpan Maulana menjelaskan bahwa adanya kemungkinan intervensi AS jika Tiongkok berani mendeklarasikan

perang secara terbuka dan hal ini dinilai akan merusak demokrasi di Taiwan jika harus jatuh ke tangan Republik Rakyat Tiongkok. Dalam tulisan ini juga dijelaskan bahwa secara garis besar kemungkinan peluang AS untuk ikut campur dalam konflik ini jika terjadi pertempuran terbuka tidak akan terjadi kecuali jika Tiongkok mengganggu keamanan dan kedaulatan AS (Hajiansyah & Maulana 2022).

Di dalam tulisan Hamdi Firdaus Firman & Aji Wibowo menjelaskan bahwa adanya implementasi dari kebijakan OCP yang semakin diperketat oleh Tiongkok dalam menjalankan politik luar negeri dan kerja sama internasionalnya semakin mengancam stabilitas serta kedaulatan negara Taiwan yang saat ini masih membutuhkan pengakuan dari negara-negara lain agar bisa menjalankan kerja sama dan politik luar negerinya secara efisien. Lalu adanya peluang reunifikasi yang terus diupayakan oleh Tiongkok imbas dari adanya negara yang belum mengakui Taiwan, dijelaskan juga bahwa Taiwan dapat menjalani proses pengadilan hukum untuk menyelesaikan dan mempertahankan wilayahnya sebagai negara merdeka yang independen, dan juga Tiongkok tidak bisa mengklaim Taiwan sebagai kedaulatannya sebab Taiwan sudah dibentuk sebelum adanya pengakuan dari negara Tiongkok sendiri (Firman & Wibowo 2024).

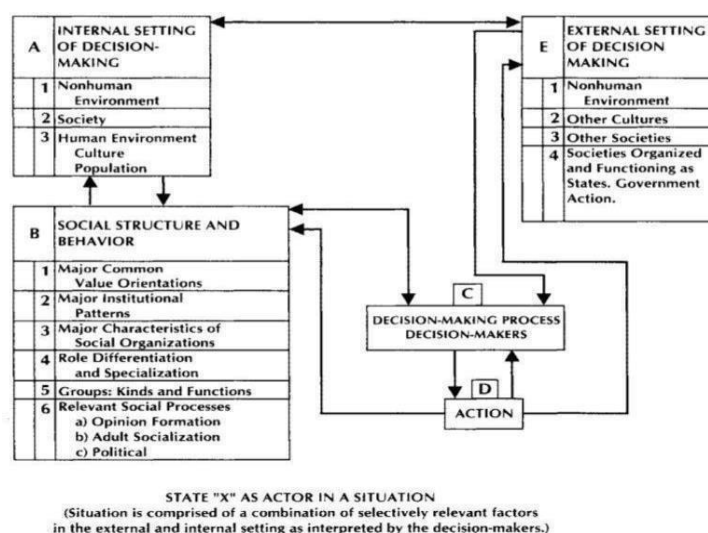
Kesimpulan dari beberapa tulisan yang meneliti mengenai kebijakan Tiongkok terhadap implementasi OCP dan juga upaya Tiongkok dalam melakukan penyatuan adalah penelitian ini mencoba untuk melengkapi penelitian sebelumnya yang masih

terfokus terhadap respon dari negara Taiwan, intervensi AS dan negara Barat terhadap Taiwan serta dampak dari adanya konflik ini jika berlanjut ke ranah konflik secara terbuka. Penelitian ini akan berusaha untuk menjelaskan mengapa Tiongkok mengambil kebijakan untuk meningkatkan upaya penyatuan kembali Tiongkok-Taiwan di era pemerintahan Xi Jinping untuk mewujudkan kebangkitan nasional (2020-2024).

1.6 Kerangka Pemikiran

Dalam buku yang berjudul *Foreign Policy-Decision Making* menurut Burto Sapin, H.W.Bruck, & Richard Snyder Decision making merupakan suatu proses yang menghasilkan pemilihan dari sejumlah rencana atau program alternatif yang didefinisikan secara sosial dan terbatas. Nantinya salah satu program atau rencana ditujukan untuk menghasilkan keadaan masa depan tertentu yang dicita-citakan oleh para pengambil keputusan (Snyder, Bruck, & Sapin 1962,78-79).

Gambar 1. 2 Kerangka Teori Decision Making



Sumber: (Snyder, Bruck, & Sapin 1962, 64)

Burto Sapin, H.W. Bruck, & Richard C.Snyder berpendapat bahwa pengambilan kebijakan setidaknya mempunyai empat aspek utama yaitu mempertimbangkan faktor dalam negeri, struktur sosial dan perilaku, luar negara, pengambilan keputusan-pembuat kebijakan, & aksi dari negara tersebut (Snyder, Bruck, & Sapin 1962, 60-65).

Internal: Dalam faktor internal Burto Sapin, H.W. Bruck, & Richard Snyder mendefinisikan bahwa kondisi yang dirujuk oleh istilah latar internal yaitu politik domestik, opini publik atau posisi geografis. Faktor internal sendiri mengarah kepada lingkungan domestik yang menjadi wadah para pengambil keputusan melakukan tugasnya yang meliputi lembaga politik, struktur sosial-ekonomi nilai-nilai dominan & organisasi birokrasi (Snyder, Bruck, & Sapin 1962 60-65; Al-Najjar & Husein 2022, 191-213).

Social Structure and Behavior: Menurut Burto Sapin, H.W. Bruck & Richard Snyder faktor yang melihat struktur sosial & perilaku dalam lingkungan sosial. Adanya interaksi antara struktur sosial & perilaku membantu negara dalam menghadapi tantangan global. Nantinya para pengambil keputusan akan melihat bagaimana struktur sosial & perilaku membentuk kebijakan luar negeri serta sebaliknya, bagaimana kebijakan luar negeri berpengaruh terhadap lingkungan masyarakat (Snyder, Bruck, & Sapin 1962, 60-65).

Eksternal: Menurut Burto Sapin, H.W. Bruck, & Richard C.Snyder, faktor eksternal secara umum mengacu pada faktor dan kondisi luar batar teritorial suatu negara, tindakan dan reaksi negara

lain terhadap aktor dan negara pengambil keputusan. Eksternal menciptakan peran vital dalam proses pengambilan keputusan kebijakan luar negeri sebuah negara. Sebab adanya faktor dalam situasi tertentu akan bergantung kepada sikap, persepsi, penilaian dan tujuan para pengambil keputusan di suatu negara. Nantinya faktor eksternal akan melihat bagaimana reaksi dan respons dari negara lain terhadap aktor pengambil Sapin, Bruck, & Snyder menegaskan bahwa adanya faktor eksternal ini memiliki hubungan komunikasi dengan faktor internal dalam menciptakan proses pengambilan keputusan serta kebijakan luar negeri. Para pembuat keputusan selayaknya wajib mempertimbangkan adanya pengaruh eksternal ini dengan adanya kepentingan nasional serta elemen internal lainnya untuk menciptakan kebijakan yang efektif dan relevan di dalam teori *decision making* (Snyder, Bruck, & Sapin 1962, 60-65; Al-Najjar & Husein 2022, 191-213).

1.7 Argumen Sementara

Setelah melakukan observasi dan peninjauan di atas dengan berbasis data yang relevan, penulis menemukan argumen bahwasanya melalui elemen yang menentukan terciptanya kebijakan melalui proses pengambilan keputusan terdapat pengaruh kuat yang menyebabkan meningkatnya tujuan politik Tiongkok di bawah kepemimpinan Presiden Xi Jinping untuk melakukan penyatuan dengan Taiwan. Selain itu dari faktor internal sendiri adanya ujian PKT di bawah kepemimpinan Presiden Xi Jinping mengenai kebangkitan nasional Tiongkok menandakan semakin tegasnya pemerintahan Tiongkok di bawah kendali

Presiden Xi tidak akan membiarkan Taiwan merdeka sebagai otoritasnya sendiri. Sebab bagi Tiongkok Taiwan merupakan luka lama akibat kesalahan Tiongkok di masa lalu.

Dari social structure & behavior adanya dukungan lingkungan sosial dan institusi yang mendorong legitimasi kebijakan penyatuan terhadap Taiwan dan adanya nilai serta latar belakang yang dipercaya di dalam lingkungan domestik memberikan peran yang relevan terhadap pengambilan kebijakan. Melalui faktor eksternal penulis menemukan fakta baru terdapat upaya keras Otoritas Taiwan yang ingin memisahkan diri dengan Tiongkok yang dianggap oleh Tiongkok sebagai dampak nyata pengaruh asing di Taiwan sehingga menciptakan sentimen nasionalisme dan munculnya gerakan anti Tiongkok semakin meningkat sehingga mengubah sikap Taiwan terhadap Tiongkok. Masuknya kebudayaan baru ini mengubah pandangan Taiwan terhadap sikap dan pengambilan keputusan menghadapi Tiongkok.

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini jenis penelitian yang digunakan melalui metode kualitatif. Adapun metode kualitatif sendiri adalah sebuah metode yang menggunakan teknik pengumpulan data dan juga analisis data yang ada melalui berbagai sumber yang relevan serta berkaitan dengan studi kasus yang akan diteliti dan diselidiki. Dengan adanya metode penelitian ini tentunya akan menghasilkan ide-ide atau

argumen baru mengenai sebuah kasus yang terjadi melalui proses analisis data (QuestionPro, n.d.).

1.8.2 Subjek dan Objek Penelitian

Subjek yang diteliti dalam penelitian ini adalah negara Tiongkok yang meningkatkan upaya reunifikasi Tiongkok-Taiwan sebagai salah satu modal untuk melakukan kebangkitan & modernisasi negara Tiongkok di bawah kepemimpinan Presiden Xi Jinping. Lalu objek dari penelitian ini yaitu proses pengambilan kebijakan upaya penyatuan Tiongkok-Taiwan.

1.8.3 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan data sekunder. Adapun data sekunder sendiri adalah data yang berasal dari berita, laporan, artikel, jurnal, & buku yang membahas isu, masalah, atau peristiwa yang berkaitan dengan tema penelitian. Hal ini berfungsi untuk membantu peneliti dalam menyeleksi, mengolah, & memberikan pemahaman lebih dalam mengenai isu terkait yang sedang diteliti (QuestionPro, n.d.).

1.8.4 Proses Penelitian

Proses penelitian akan menggunakan teknik pengumpulan berbagai data terkait dari beberapa sumber yang tersedia, kemudian akan dilakukan penganalisis atau pengolahan data dari sumber-sumber yang diperoleh melalui jurnal, buku, artikel media, laporan, berita, & surat kabar.

Dalam mencari berbagai sumber data yang ada tentunya akan menyeleksi asal usul sumber yang terpercaya, kredibel, & relevan. Serta penelitian ini akan menyesuaikan tahun analisis yang telah direncanakan agar lebih mendapatkan situasi & dinamika politik negara yang akan diteliti. Proses yang selanjutnya yaitu menentukan sub bab pembahasan dari data yang telah di seleksi dan nantinya sampai di bagian akhir yaitu kesimpulan dari proses penelitian yang telah dilakukan.

1.9 Sistematika Pembahasan

Bab 1, bab ini menjelaskan latar belakang hingga metode penelitian. Bab ini nantinya berfungsi untuk menjadi tiang penelitian atau dasar dari proses penelitian untuk menganalisis konflik antara Tiongkok & Taiwan terkait upaya reunifikasi Presiden Xi Jinping melalui pengambilan keputusan yang nantinya akan dijelaskan pada bab II & III.

Bab 2, bab ini menjelaskan definisi dari variabel teori *Internal & Social Structure & Behavior* serta menghubungkan masing-masing teori dalam studi kasus. Bab ini juga membahas lembaga, pemerintahan, institusi, & respon masyarakat Tiongkok yang mempengaruhi kebijakan Tiongkok. Beberapa elemen ini berguna untuk lebih memahami konteks pada analisis yang tersedia pada bab III nantinya.

Bab 3, Dalam bab ini peneliti mendefinisikan variabel elemen *eksternal* yang menjelaskan terkait respon masyarakat Taiwan, penolakan pemerintah Taiwan terhadap penyatuan,

intervensi AS, perjanjian kebijakan, serta undang- undang hubungan antara dua negara yang menjadi beberapa variabel penting.

Bab 4, Peneliti menyimpulkan hasil dari penelitian yang dimulai dari bab I sampai bab III yang mencakup rekomendasi dan saran penelitian untuk peneliti selanjutnya.

BAB 2

FAKTOR *INTERNAL*, *SOCIAL STRUCTURE*, & BEHAVIOR

Pada BAB 1 sudah menjelaskan dan menguraikan mengenai latar belakang hingga metodologi yang menjadi dasar dari penelitian ini. Untuk meneruskan pembahasan dalam penelitian. Penulis menggunakan BAB 2 sebagai penjelasan untuk konteks yang berkesinambungan dengan BAB 3. Pada bab ini nantinya, pertama penulis akan menjelaskan definisi dari indikator atau variabel teori yang sudah di cantumkan di dalam bagian kerangka pemikiran pada latar belakang yaitu Faktor *Internal & Social Structure & Behavior*, diikuti dengan analisis yang mendalami faktor internal mengapa Tiongkok berambisi untuk melakukan penyatuan dengan Taiwan.

Kedua, penulis akan menjelaskan apa saja faktor yang membentuk doktrin Taiwan untuk menolak upaya penyatuan damai & intervensi AS terhadap Taiwan yang dijelaskan pada BAB 3 faktor eksternal.

2.1 Faktor Internal

Faktor internal merupakan cara negara berperilaku dengan melihat suatu peristiwa melalui kondisi lingkungan di dalam negeri atau domestik dengan unsur- unsur yang terlibat seperti opini publik, politik domestik, serta posisi geografis suatu negara.

Suatu negara atau aktor melihat pengambilan keputusan harus mempertimbangkan kondisi suatu masyarakat dalam negeri serta kondisi politik dalam negeri suatu negara agar memenuhi harapan publik (Snyder, Bruck, & Sapin 1962, 60-65; Al-Najjar & Husein 2022, 191-213).

2.1.1 Non Human Environment

Non Human Environment adalah sebuah elemen yang melihat dari adanya dampak di dalam lingkungan domestik yang tidak memiliki kesinambungan dengan manusia, seperti sejarah, budaya, letak geografis, serta kondisi perekonomian suatu negara yang merupakan struktur internal sehingga mempengaruhi pola pikir para pengambil keputusan (Snyder, Bruck, & Sapin 1962, 65; Erdiatulha, Karjaya, & Rizki 2020, 1-14).

1. Faktor Geografis

Jika dilihat dari faktor geografis adanya dorongan upaya untuk melakukan penyatuan terhadap Taiwan, Tiongkok melihat betapa pentingnya pulau Taiwan tersebut untuk diambil alih oleh pemerintahan karena posisi geografis zona perairan internasional antara Tiongkok & Taiwan yang sangat strategis. Tiongkok telah mengembangkan jalur perekonomiannya dengan Belt & Road Initiative yang dimana Tiongkok memanfaatkan jalur sutra ini sebagai peluang emas untuk memperluas cangkupan ekonominya yang berguna sebagai pengembangan strategi pembangunan infrastruktur dan proyeksi pembangunan negara-negara lainnya yang menjalin kerja sama

dengan Tiongkok. Dengan adanya strategi ini maka Tiongkok akan mewujudkan misinya untuk menjadi negara dengan ekonomi terbesar di dunia, negara dengan GDP tertinggi di dunia, dan negara dengan tingkat eksportir terbesar di dunia melalui jalur ekspansi ekonominya ke Asia yang menghubungkan jalur Timur dan Barat (Amin 2023, 114-116).

Gambar 2. 1 Zona Strategis Taiwan yang Menjadi Tujuan Politik Tiongkok



(Sumber: U.S. Department of Defense 2023, 52).

Kedekatan posisi geografisnya terhadap Taiwan menjadikan faktor penting mengapa Tiongkok ingin melakukan upaya penyatuan terhadap Taiwan. Wilayah Taiwan sendiri yang berada di antara sekutu negara AS seperti Jepang, Filipina, & Thailand yang menjadi ancaman secara langsung karena terdapat pangkalan militer AS yang dapat mengancam teritorial dan mengancam tujuan politik Tiongkok (Taiwan Politics 2024). Bagi Tiongkok, Taiwan merupakan wilayah kedaulatan

Tiongkok akibat adanya kesamaan keturunan dari suku Han dan aspek historis wilayah pulau Formosa merupakan bagian dari Tiongkok yang terpisah akibat adanya kesalahan masyarakat Tiongkok di masa lalu karena perang saudara. Oleh karena itu jika Taiwan berhasil menjadi negara yang merdeka, maka Taiwan akan menjadi basis kekuatan baru bagi AS dan sekutunya. Hal ini terjadi akibat adanya budaya & politik masyarakat Taiwan yang menjunjung tinggi nilai demokrasi. Selain itu apabila Taiwan merdeka tentunya AS akan bebas mengoperasikan armada militernya di Selat Taiwan yang memicu peluang tindakan spionase AS terhadap Tiongkok. (Taiwan Politics 2024).

2. Sejarah & Budaya

Jika dilihat melalui kacamata sejarah & budaya, Tiongkok & Taiwan merupakan negara yang memiliki nenek moyang yang sama, hal ini dibuktikan dengan adanya ras Tionghoa yang berjumlah 98% yang menjadi masyarakat mayoritas di Taiwan. Selain itu mereka juga berbicara dengan bahasa Tionghoa dan juga bahasa Hokkien. Masyarakat Tiongkok daratan juga merayakan festival dan acara kebudayaan rakyat seperti tahun baru Imlek/Chun Jie & Cap Go Meh/Yuan Xiao Jie, yang sama layaknya masyarakat Taiwan juga merayakannya. Menurut laporan yang ditulis oleh Kedutaan Besar RRT di Filipina, Taiwan merupakan bagian dari Tiongkok sejak zaman kuno. Terdapat sejarah yang panjang adanya pertumbuhan masyarakat

Taiwan oleh masyarakat Tionghoa yang dibuktikan dengan adanya karya seni *Linhai Tuizhi* yang ditulis oleh Shen Ying.

Pada abad ke 18 Shen menuliskan deskripsi awal mengenai wilayah Taiwan, lalu Departemen Inspeksi Penghu diciptakan untuk mengurus kepentingan Taiwan dan tempat lain di bawah kekuasaan yurisdiksi kabupaten Tong'an, Quanzhou, & Fujian. Lalu Dinasti Qing membentuk prefektur Taiwan di bawah yurisdiksi Fujian pada tahun 1855, dan Taiwan di ubah menjadi negara bagian Tiongkok ke-20 (Embassy of the People's Republic of China in the Republic of the Philipine 2024). Meskipun Taiwan mengalami pendudukan kolonial sebanyak dua kali, Taiwan berhasil diambil alih kembali oleh Tiongkok. Pada tahun 1662, pahlawan nasional dari Tiongkok yang bernama Zheng Chenggong berjuang menyingkirkan penjajah bangsa kolonial Belanda dan kembali merampas Taiwan dari tangan Belanda. Lalu pada tahun 1945, kemenangan besar rakyat Tiongkok atas perbudakan dan penjajahan Jepang telah menutup setengah abad perbudakan dan kekerasan di bawah kekuasaan Jepang. Selain itu sejarah membuktikan bahwa adanya dokumen pada tanggal 1 Desember 1943, yang menyatakan bahwa pemerintah Tiongkok, AS, & Inggris merilis Deklarasi Kairo yang memiliki tujuan dalam pernyataan deklarasi tersebut yaitu "Melakukan pengembalian wilayah yang berhasil dirampas oleh Jepang dari Tiongkok wilayah ini mencakup Tiongkok Timur Laut Daratan

Tiongkok, Taiwan, dan Kepulauan Penghu” (Embassy of the People’s Republic of China in the Republic of the Philipines 2024).

Terdapat dokumen lainnya yang membuktikan bahwa Taiwan merupakan wilayah Tiongkok yang tidak dapat dipisahkan yaitu Deklarasi Postdam yang diratifikasi bersama oleh Tiongkok, AS, Inggris, & Uni Soviet. Disisi lain secara tegas menyatakan bahwa persyaratan Deklarasi Kairo akan dilaksanakan tepat di bulan September, Jepang mengesahkan “Pasal Penyerahan Jepang” dan berkomitmen untuk melaksanakan hasil konsekuensi yang tercantum di dalam Deklarasi Postdam. Lalu pada tanggal 25 Oktober 1945, pemerintah Tiongkok mendeklarasikan bahwa Tiongkok akan memulihkan pelaksanaan kedaulatan Taiwan & mengadakan upacara penyerahan provinsi Taiwan di Tiongkok yang berlokasi di Taipei, dan Taiwan berhasil kembali ke pangkuan ibu pertiwi meskipun kembali terpisah pada 1949, akibat perang saudara Tiongkok (Embassy of the People’s Republic of China in the Republic of the Philipine 2024).

2.1.2 Society

Society adalah sebuah elemen yang melihat perilaku sosial masyarakat, kultur sosial, struktur sosial, nilai, & norma yang nantinya menjadi acuan bagaimana negara mengambil keputusan dan berperilaku di dunia internasional dengan melihat perilaku

sosial di masyarakat. Definisi aspek masyarakat sendiri meliputi opini publik, struktur sosial, & perilaku kolektif yang menjadi target dalam pembuatan kebijakan (Snyder, Bruck , & Sapin 1962, 60-65;Erdiatulha, Karjaya, & Rizki 2020, 1-14).

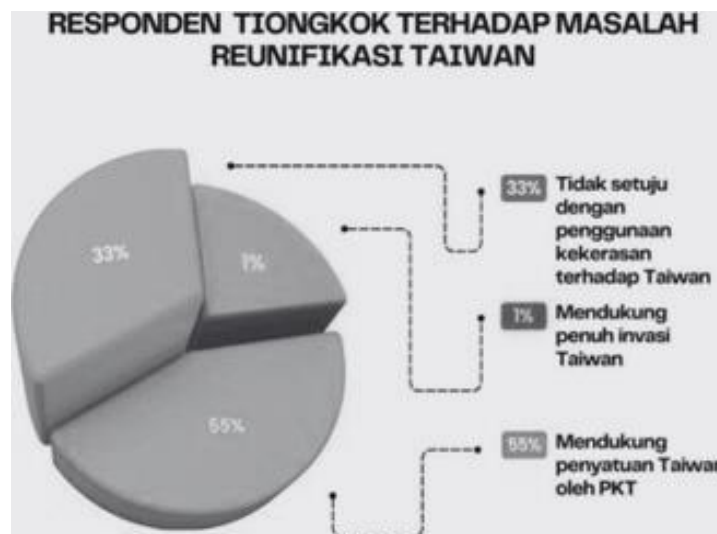
1. Sikap Publik Tiongkok Terhadap Isu Penyatuan

Masyarakat Tiongkok sangat menjunjung tinggi persatuan nasional dan kedaulatan wilayah sebagai identitas bangsa dan kehormatan nasional. Selain itu adanya nilai bersama yang dianut oleh etnis Tionghoa baik di Tiongkok dan Taiwan, serta adanya norma loyalitas dan kolektivitas kepada negara menjadi alat politik PKT dan Xi dalam melakukan peremajaan nasional (Yongshi.com 2020).

Selain itu adanya sentimen nasionalisme dalam isu penyatuan Taiwan, respon masyarakat terhadap kebijakan terkait mendukung atau menentang dan pengaruh media menjadi faktor pendukung adanya upaya penyatuan. Masyarakat Tiongkok menganggap bahwa adanya upaya penyatuan yang ingin direalisasikan oleh PKT sebagai upaya Kebangkitan Nasional dan Modernisasi Bangsa merupakan cita cita nasionalis PKT. Dilansir dari penelitian yang dilakukan oleh Adam Y.Liu yang merupakan asisten profesor dari Universitas Nasional Singapura dan profesor madya Li Xiaojun dari Universitas New York pada bulan Mei tahun 2023, terdapat sampel yang diambil sebanyak 1.800 Jiwa yang mewakili

sampel populasi masyarakat Tiongkok daratan pada tahun 2023 berjumlah 1.411 miliar jiwa, pertanyaan tersebut mengenai isu “Penyatuan militer Taiwan”, penelitian ini kemudian mendapatkan hasil sebanyak 55% responden menyatakan dukungan terhadap penyatuan Taiwan oleh Tiongkok, 33% responden tidak setuju dengan adanya penggunaan kekerasan dan intimidasi terhadap upaya penyatuan Taiwan, dan terdapat 1% yang mendukung penuh harapan untuk segera melakukan invasi dan serangan terhadap Taiwan (Commonwealth Magazine 2024).

Grafik 2. 1 *Grafik 2. 1 Opini Publik Terhadap Isu Reunifikasi Berbasis Kertas Tertulis*



(Sumber: Commonwealth Magazine 2024)

Lalu terdapat juga penelitian jajak pendapat masyarakat daratan Tiongkok yang dilakukan peneliti lingkungan sosial Tiongkok bernama Liu Yao yang dilakukan melalui panel *OPT- in Online*, responden ini di tarik dari seluruh masyarakat

daratan Tiongkok dari berbagai usia, jenis kelamin, & tingkat pendapatan mereka sehari-hari. Sebanyak lebih dari 2000 kuesioner berhasil disebarkan dan berhasil memperoleh 1824 kuesioner yang valid terkumpul. Hasilnya sebanyak 55% jumlah responden yang mendukung adanya aksi perang skala penuh dalam menghadapi Taiwan, dan terdapat 1% orang yang mendukung aksi perang secara mendadak atau ekstrim (Commonwealth Magazine 2024).

Lalu terdapat hasil sebanyak 58% yang mendukung aksi mendaratkan operasi militer secara terbatas di wilayah kedaulatan Taiwan, dan juga terdapat hasil 57% responden yang mendukung adanya penerapan sanksi ekonomi dalam skala besar untuk melemahkan kekuatan Taiwan yang banyak bergantung pada impor sumber daya alam negara lain. Selain itu Liu juga memperoleh hasil sebanyak 57% mendukung Tiongkok untuk memperkuat *status quo* nya dengan terus mengupayakan peningkatan level kekuatan militer dan ekonomi hingga saat penyatuan tepat pada waktunya, dalam artian menunggu sambil mengasah kemampuan agar semakin matang untuk melancarkan aksi di waktu yang direncanakan (Commonwealth Magazine 2024).

Grafik 2. 2 Opini Publik Tiongkok Terhadap Isu Reunifikasi Berbasis Kertas Online



(Sumber: Commonwealth Magazine 2024)

Salah satu ahli asisten profesor Departemen Ilmu Politik di Universitas Nevada yang terletak di kota Las Vegas bernama Wang Hongen, mengungkapkan bahwa melalui penelitiannya dari hasil jajak pendapat masyarakat Tiongkok mengenai pendapat mereka terhadap upaya reunifikasi Taiwan. Wang menyimpulkan bahwa sikap dari masyarakat Tiongkok yang unik, semakin tinggi tingkat pendidikan mereka, kelas sosial, & tingkat pendapatan maka akan semakin besar keinginan mereka untuk mendukung adanya upaya reunifikasi yang ingin dilakukan oleh Tiongkok. Hal ini terjadi karena adanya stabilitas masyarakat Tiongkok terhadap propaganda jajak pendapat yang dimana semakin mereka menganggap bahwa tempat atau kota yang mereka tinggali lebih maju dari pada Taiwan semakin besar pula keinginan masyarakat Tiongkok untuk mendukung upaya penyatuan Taiwan menggunakan

kekuatan militer (Commonwealth Magazine 2024).

2.1.3 Human Environment

Human Environment merupakan sebuah elemen yang melihat konteks lingkungan manusia. Para pembuat keputusan mengalami perkembangan budaya selama tinggal di negara asalnya. Sebab partai internal suatu negara mempengaruhi pembuatan kebijakan politik, para pengambil keputusan biasanya melihat asal usul motif partai yang dipercayai. Pertikaian politik dalam partai internal menunjukkan dinamika, hubungan antara individu, kelompok, & entitas di lingkungan politik manusia. Menurut Burto Sapin, H.W. Bruck, & Richard C.Snyder lingkungan manusia mencakup dinamika politik domestik, latar belakang partai penguasa, & tekanan kelompok kepentingan yang terkait untuk meneliti suatu kebijakan yang akan diterapkan oleh negara (Snyder, Bruck, & Sapin 1962, 60-65;Erdiatulha, Karjaya, & Rizki 2020, 1-14).

1. Dukungan Politik Domestik

Adanya dukungan partai domestik dalam lingkungan internal Tiongkok terhadap upaya reunifikasi dibuktikan dengan adanya Taiwan Democratic Self-Government League (TDSL). Partai yang berhaluan non komunis ini bekerja di bawah kepemimpinan PKT yang beranggotakan masyarakat Tiongkok yang memiliki hubungan dengan Taiwan. Su Hui selaku ketua dari TDSL menegaskan pada tanggal 5 Maret 2023, pada saat konferensi pers konsultatif politik Tiongkok

mengatakan bahwa TDSL akan sepenuhnya mendukung & mengerahkan tenaganya yang unik dalam upaya penyatuan dengan Taiwan sebagai warisan budaya dan leluhur yang tidak dapat dipisahkan. TDSL juga akan berupaya untuk meningkatkan upaya kerja sama ekonomi lintas selat agar mempermudah jalanya proses penyatuan damai (NPC & CPPCC Annual Sessions 2023).

Pada 5 Agustus 2022, terdapat 8 partai yang berada di bawah kekuasaan PKT termasuk TDSL mengeluarkan pernyataan secara bersamaan bahwa mereka menentang , mengecam, & mengutuk adanya kunjungan Nancy Pelosi (Ketua DPR AS) ke wilayah Taiwan pada tanggal 3 Agustus 2022, kedelapan partai ini yaitu Revolutionary Committee of the Kuomintang (RCCK), China Association for Promoting Democracy (CPAD), China Democratic League (CDL), China Peasants' and Workers Democratic Party (CPWDP), China Democratic National Construction Association (CDNCA), China Zhi Gong Party (PZGT), & Perhimpunan Masyarakat Jiuzan (Hanzi), secara serentak menyatakan bahwa Tiongkok hanya ada satu yaitu Daratan Tiongkok, Taiwan merupakan wilayah yang terpisah dan merupakan wilayah kedaulatan Tiongkok. Setelah mengeluarkan pernyataan kedelapan partai tersebut menegaskan untuk berkomitmen & mendukung semua gerakan yang diperlukan dan diambil oleh pemerintahan Tiongkok untuk menjaga kepentingan kedaulatan & integritas

teritorial (China Voices 2022).

Terdapat dorongan aspek latar belakang partai penguasa yaitu Partai Komunis Tiongkok (PKT) merupakan partai utama yang memegang pemerintahan Daratan Tiongkok sejak berakhirnya perang saudara yang terjadi pada tahun (1949). Sejak memimpin Tiongkok PKT memegang teguh adanya prinsip Satu Tiongkok yang dimana hanya ada satu Tiongkok di dunia yaitu RRT wilayah lainnya seperti Hongkong, Makau & Taiwan merupakan bagian dari Tiongkok (RFI.com 2024).

Selain itu juga terdapat prinsip penolakan intervensi asing yang tertuang di dalam buku putih dan adanya prinsip Han Entric sebagai ideologi nasionalisme Tiongkok mengenai keutuhan wilayah dan sebagai alat legitimasi PKT terhadap masyarakat Tiongkok mengenai proses kebangkitan besar bangsa Tiongkok yaitu dengan melakukan penyatuan kembali terhadap Taiwan (RFI.com 2024). Fakta lain membuktikan bahwa terdapat undang-undang Anti-Secession (2005) yang memberikan kepastian hukum bagi Tiongkok untuk mengerahkan segala upaya termasuk kekuatan militer apabila Taiwan menyakan kemerdekaan baik itu secara individu ataupun intervensi asing (Mainland Affairs Council 2005).

2. Kepemimpinan Presiden Xi Jinping

Xi Jinping lahir dari keluarga yang telah lama mengabdikan dengan PKT, ayahnya yang bernama Xi Zhongxun merupakan

salah satu mahasiswa yang terlibat dalam peristiwa demo anti Jepang pada tahun 1919, dan diangkat oleh PKT menjadi bupati Jainca di wilayah kabupaten Tibet Timur setelah perang saudara usai. Berkat posisi strategis ayahnya, Xi mendapatkan posisi yang strategis sejak bergabung dengan Liga Pemuda Komunis pada umur 18 tahun. Pada tahun 2000 sampai 2002, Xi menjabat sebagai gubernur Fujian dan selama memimpin Fujian Xi berusaha untuk menarik investor Taiwan agar mengembangkan wilayah Fujian karena wilayah tersebut memiliki hubungan sejarah dan spiritual terhadap masyarakat Taiwan. Hal inilah yang menjadi cikal bakal Xi terhadap keseriusannya dalam mewujudkan hubungan lintas selat yang lebih intens dan di implementasikan ketika Xi menjadi Presiden Tiongkok pada tahun 2013 (Wicaksono 2017, 655-674).

Kepemimpinan Presiden Xi ketika pertama kali menjabat sebagai pemimpin Tiongkok menerapkan kebijakan “Diplomatik Kesadaran” yang memberikan fakta kepada dunia internasional bahwa Tiongkok saat ini sudah berevolusi menjadi negara yang kuat, perkasa, yang tidak ingin lagi diajarkan oleh negara lain, akan tetapi tetap menjaga perdamaian & hubungan politik (Wicaksono 2017, 655- 674). Kebijakan “Diplomatik Kesadaran” ini juga searah dengan kebijakan kepemimpinan Xi di dalam pemerintahan. Bentuk kepemimpinan Presiden Xi menolak untuk didikte oleh siapa pun dalam menentukan kebijakan pemerintahan. Hal ini

berbanding terbalik dengan Hu Jintao yang menggunakan metode kepemimpinan bersama. Adapun tujuan Xi melakukan kebijakan ini untuk membentuk citra & metode kepemimpinan mandiri yang kuat dan dipercaya sebagai langkah politik untuk pengukuhan kekuasaan langsung di bawah kepemimpinannya. Xi juga membentuk kelompok kecil yang berguna untuk menentukan kebijakan yang terbatas yaitu angkatan siber, militer, & finansial yang masing-masing diketuai oleh dirinya sendiri (Wicaksono 2017, 655-674).

Adanya dukungan PKT terhadap penyatuan menjadikan landasan politik utama untuk memperkuat posisi Xi dalam menyelesaikan isu ini. Rancangan “Chinese Dream” yang digunakan oleh Xi dalam kepemimpinannya menggabungkan antara kebangkitan nasional, integritas bangsa, & koalisi kepala partai yang searah dengan pandangan “sosialisme” dengan metode Tiongkok sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Deng Xiaoping. Di dalam Konsep “Chinese Dream” terdapat konsep “Sasaran Dua Abad”, abad pertama yaitu “Mencapai Masyarakat yang Makmur” pada tahun 2021 yang bertepatan dengan 100 tahun kekuasaan PKT memerintah Tiongkok. Lalu abad kedua yaitu “Menggapai Negara Sosialis Tiongkok” yang kuat dan kaya ditargetkan tepat pada tahun 2049 ketika 100 tahun berdirinya People’s Republic of China (PROC) (Wicaksono 2017, 655-674).

Xi juga mendefinisikan bahwa di bawah kebijakannya Tiongkok akan berevolusi melahirkan masyarakat yang makmur dan menjadikan modernisasi sosialisme sebelum tahun 2035, lalu ia mengatakan Tiongkok sebagai negara yang memiliki ketangkasan nasional terkemuka dan pengaruh internasional pada abad ke-21 dalam hubungan lintas selat. Dalam melakukan pendekatannya terhadap Taiwan, Xi pertama kali bertemu dengan Presiden Taiwan Ma Ying-Jeou pada November 2015. Tiongkok untuk pertama kalinya kembali mempromosikan konsep “Satu Negara Dua Sistem” dalam upaya penyatuan damai terhadap Taiwan, Ma pun menyambut Xi dengan hangat dan damai serta berusaha untuk mempertimbangkan penawaran Tiongkok terhadap Taiwan (Wicaksono 2017, 655-674). Lalu situasi lintas selat berubah ketika DPP yang memegang kendali Taiwan dengan slogan politik “Kemerdekaan Taiwan” di bawah Tsai ing-wen pada tahun 2016 & 2020. Xi mulai melakukan tindakan agresif dan penekanan politik terhadap Taiwan (Swaine & Par 2024, 4-34).

Ambisi Xi terhadap upaya penyatuan juga dibuktikan dengan adanya upaya Tiongkok yang ikut campur pada pemilu 2020 & 2024, dengan cara melakukan kampanye disinformasi yaitu menyebarkan berita palsu dan propaganda Tiongkok di dalam masyarakat Taiwan, pemutusan hubungan diplomatik, kerja sama ekonomi, serta mengunjuk kekuatan armada militer di sekitar wilayah Taiwan (Center for American Progress 2024).

Pada tahun 2020 PLA mulai meningkatkan intensifnya untuk melakukan operasi armada militer di wilayah kedaulatan Taiwan baik udara dan laut. Tiongkok meluncurkan armada pesawat latih, pesawat pengebom dan pesawat tempur siap serbu serta melakukan pelayaran di wilayah teritorial Taiwan dengan meluncurkan kapal *fregat & destroyer* di perairan Taiwan. Selain itu PLA juga mulai aktif melakukan latihan serangan amfibi. Langkah ini dilakukan Xi atas ketidakpuasan Tiongkok terhadap sikap Taiwan yang dinilai angkuh & mencoba untuk menantang Tiongkok agar menggunakan jalur kekerasan. Taiwan sendiri menilai langkah ini dilakukan Xi sebagai upaya provokasi yang membawa pesan dan tujuan politik yang memaksa Taiwan untuk segera melakukan perundingan dan melemahkan mentalitas, moral prajurit, serta armada militer Taiwan yang dinilai tidak sebanding dengan kekuatan Tiongkok (Swaine & Par 2024, 4-34).

Puncak dari aktivitas militer ini pada bulan Agustus 2022 saat Nancy Pelosi melakukan kunjungan ke Taiwan. Xi menganggap adanya kunjungan ini sebagai aksi provokasi Taiwan & AS yang ingin menguji kekuatan Tiongkok dengan adanya intervensi asing dalam permasalahan internal Tiongkok (U.S. Department of Defense 2021). Adanya diktum dari Mao Zedong yang berbunyi “Siapapun yang memiliki tentara, dialah yang berkuasa” menjadi motivasi Tiongkok di era kepemimpinan Xi melakukan modernisasi militernya menjadi

alat diplomasi yang penting untuk mencapai tujuan nasional & keamanan Tiongkok. Pada kongres PKT ke 19, Xi menargetkan PLA pada tahun 2020 berupaya memajukan tujuan militer nasional untuk mencapai tujuan di berbagai bidang, pada tahun 2035 militer Tiongkok berkembang menjadi ketahanan yang modern dan berambisi membentuk militer Tiongkok menjadi ketahanan kelas dunia pada 2050. Reformasi militer ini dilakukan oleh Xi untuk mendukung tujuan politiknya dengan menggunakan sabuk sutera dan masalah domestik Tiongkok meliputi korupsi, separatisme, & terorisme (Panda 2021,276-297).

Xi telah menaruh perhatian reformasi militer ini sejak meningkatnya ketegangan perang dagang dengan AS di bawah Trump hingga Biden yang juga berusaha ikut campur dalam masalah Taiwan. PLA menaikkan fungsinya dalam mengembangkan ketahanan militer untuk membendung dan mengusik kekuatan AS serta dukungan AS ke Taiwan baik itu secara ekonomi & militer. Bagi Xi Taiwan merupakan tujuan utama politiknya serta bagian intens dalam kedaulatan Tiongkok, ini merupakan impian yang harus diwujudkan untuk negara yang sedang bangkit dari keterpurukan. Oleh karena itu Taiwan mendapat perhatian yang agresif bagi Xi karena penyatuan Taiwan menjadi agenda bersejarah yang ingin dicapai untuk mewujudkan keinginan Mao dan agenda bersejarah Xi sebagai pemimpin Tiongkok (Panda 2021, 276-

297).

Dalam proses penyatuan, Xi Jinping berperan sebagai aktor sentral pembentuk narasi melalui pidatonya pada peringatan 40 tahun “Pesan kepada rekan senegara Taiwan”. Xi menggunakan retorika penggolongan masyarakat Taiwan dalam melakukan upaya penyatuan nasional berdasarkan 3 golongan yaitu saudara, teman, & musuh. Xi mencerminkan gaya kepemimpinan Mao Zedong terdahulu ketika membangun negara komunis setelah perang saudara, Mao Zedong menggolongkan rakyat Tiongkok antara setia terhadap PKT atau pengikut KMT. Xi secara implisit dalam pidatonya mengungkapkan bahwa Taiwan merupakan “Compatriots” atau rekan senegara & saudara setanah air yang tidak dapat terpisahkan. Xi juga mengungkapkan mencapai kesejahteraan Tiongkok merupakan tugas dari masyarakat Tiongkok sendiri & kemerdekaan Taiwan merupakan arus balik sejarah serta jalan buntu yang dapat menimbulkan perpecahan akibat adanya provokasi kaum separatis yang menolak modernisasi Tiongkok. Dalam upaya penyatuan nasional saudara merupakan kelompok masyarakat yang mendukung dan terbuka terhadap reunifikasi, teman merupakan golongan masyarakat Taiwan yang terbuka untuk melakukan dialog walaupun berbeda tujuan, dan musuh sebagai kelompok yang mendukung kemerdekaan Taiwan & penghambat proses kebangkitan nasional Tiongkok (Yanbing 2021).

Kelompok elit politik Tiongkok secara konsisten juga menganut retorika kepemimpinan Xi Jinping dalam memandang masyarakat Taiwan terhadap upaya penyatuan dengan cara mendefinisikan elit politik Taiwan yang menolak kemerdekaan Taiwan sebagai kolega, & mereka yang mendukung kemerdekaan Taiwan sebagai musuh. Adanya pernyataan pejabat Kementerian Pertahanan Nasional Kolonel Senior Wu Qian pada tahun 2024, yang mengatakan “Upaya DPP & aksi separatis yang berusaha untuk kemerdekaan Taiwan bagaikan belalang yang mencoba menghentikan kereta perang, & mencari kehancuran mereka sendiri” (Ministry of National Defense of the People's Republic of China 2024). Serta pernyataan Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi pada tahun 2022, yang menyebutkan bahwa “Dinamika perubahan politik Taiwan tidak akan mengubah sejarah mereka sebagai bagian dari Tiongkok” (Ministry of National Defense of the People's Republic of China 2024).

3. Tekanan Kelompok Kepentingan

Selama menjabat sebagai pemimpin Tiongkok dalam setiap pidato yang dilakukan baik dalam kongres partai maupun acara festival rakyat, Xi Jinping secara konsisten menyampaikan kepada masyarakat bahwa Tiongkok akan berupaya untuk melakukan upaya penyatuan kembali dan menumpas apa pun yang mendukung kemerdekaan Taiwan. Ia juga memastikan

berjanji bahwa kekuasaannya akan melampaui Mao Zedong yang belum mampu mengakhiri perpecahan di Selat Taiwan. Hal ini secara langsung memberikan kepastian kepada masyarakat Tiongkok terkait kontrol Xi atas kekuasaan. Salah satu modal Xi jika ingin memperkuat kekuasaan sebagai pemimpin PKT sekaligus pemimpin Tiongkok yaitu adanya pengembalian Taiwan. Sebab jika hal ini tidak tercapai tentunya masyarakat akan menurunkan kepercayaan terhadap Xi Jinping, selain itu Presiden Xi juga masih menghadapi lawan yang kuat di dalam internal partai yaitu elit politik yang ingin menggulingkan kekuasaannya. Oleh karena itu 5 tahun kedepan setelah akan menjadi penentu terhadap kekuasaan Xi Jinping baik di pemerintahan ataupun internal partai (Xiao 2022).

2.2 Faktor Social Structure and Behavior

Dalam faktor ini para pembuat keputusan harus memperhatikan aspek struktur sosial dan perilaku masyarakat di suatu negara. Adanya sosialisasi antara struktur sosial dan perilaku masyarakat akan menentukan serta membangun respon negara dalam menghadapi tantangan & situasi global. Nantinya pembuat keputusan akan mengetahui bagaimana aspek-aspek domestik berpengaruh terhadap kebijakan luar negeri, serta sebaliknya bagaimana kebijakan luar negeri yang dibentuk mempengaruhi lingkungan domestik di suatu negara (Snyder, Bruck, & Sapin 1962, 60-65; Septiana, Rizki, & Makhroja, n.d., 1-18).

2.2.1 *Major Common Value Orientation*

Major Common Value Orientations merupakan elemen yang melihat aspek persepsi, pilihan dan harapan yang nantinya menciptakan pandangan atau nilai umum utama yang diyakini oleh seluruh masyarakat (Snyder, Bruck, & Sapin 1962, 60-65; Erdiatulha, Karjaya, & Rizki 2020, 1-14).

1. Nasionalisme Bangsa Tiongkok

Di era pemerintahan Xi Jinping nasionalisme menjadi nilai dominan yang digunakan untuk membangun dukungan dan elit rakyat. Nasionalisme juga digunakan untuk membangun kepercayaan diri nasional yang menjadi pilar kebangkitan nasional. Selain itu juga kekuasaan nasionalisme juga sudah bergeser yang sebelumnya dikuasai oleh pemerintah di era Xi dikuasai bersama oleh pemerintah dan rakyat sehingga memainkan peran sosial yang lebih luas. Nasionalisme yang sebelumnya merupakan perubahan rakyat Tiongkok dari abad yang penuh penghinaan & tragis akibat adanya penjajahan menjadi nasionalisme kepercayaan diri dengan kemajuan pesat ekonomi dan kekuatan Tiongkok. Sehingga Xi & PKT memainkan peran besar mobilisasi nasionalisme Tiongkok yang meyakinkan masyarakat untuk percaya bahwa saat ini Tiongkok jauh lebih kuat. Adanya nasionalisme ini mendorong rakyat untuk mendukung pemerintah dengan menggunakan nasionalisme ekspansif sebagai simbol menyelamatkan negara dari intervensi asing di luar trinitas PKT, Bangsa Tiongkok & rakyat Tiongkok

dan kebangkitan nasional untuk mewujudkan negara sosialis yang kuat dan kaya pada tahun 2049 (Youzhou 2021).

2. Penolakan Intervensi Asing

Penolakan terhadap campur tangan asing merupakan respons nilai terhadap pengalaman Tiongkok di masa lalu selama yang disebut sebagai abad penghinaan. Adanya intervensi asing di Taiwan menjadi tantangan utama bagi Tiongkok untuk menyelesaikan masalah Taiwan. Sebab Tiongkok melihat saat ini banyak negara yang berusaha untuk merusak pilar utama prinsip Satu Tiongkok sebagai perdamaian & stabilitas lintas selat salah satunya yaitu AS. Tiongkok melihat demokrasi yang dijadikan sebagai kunci utama dalam mendukung Taiwan, namun masalah inti dari Taiwan bukanlah demokrasi namun masalah prinsip utama yang berkaitan dengan prinsip kedaulatan & integritas wilayah Tiongkok (Internasional Department Central Committee of CPC 2024).

2.2.2 Major Institutional Patterns

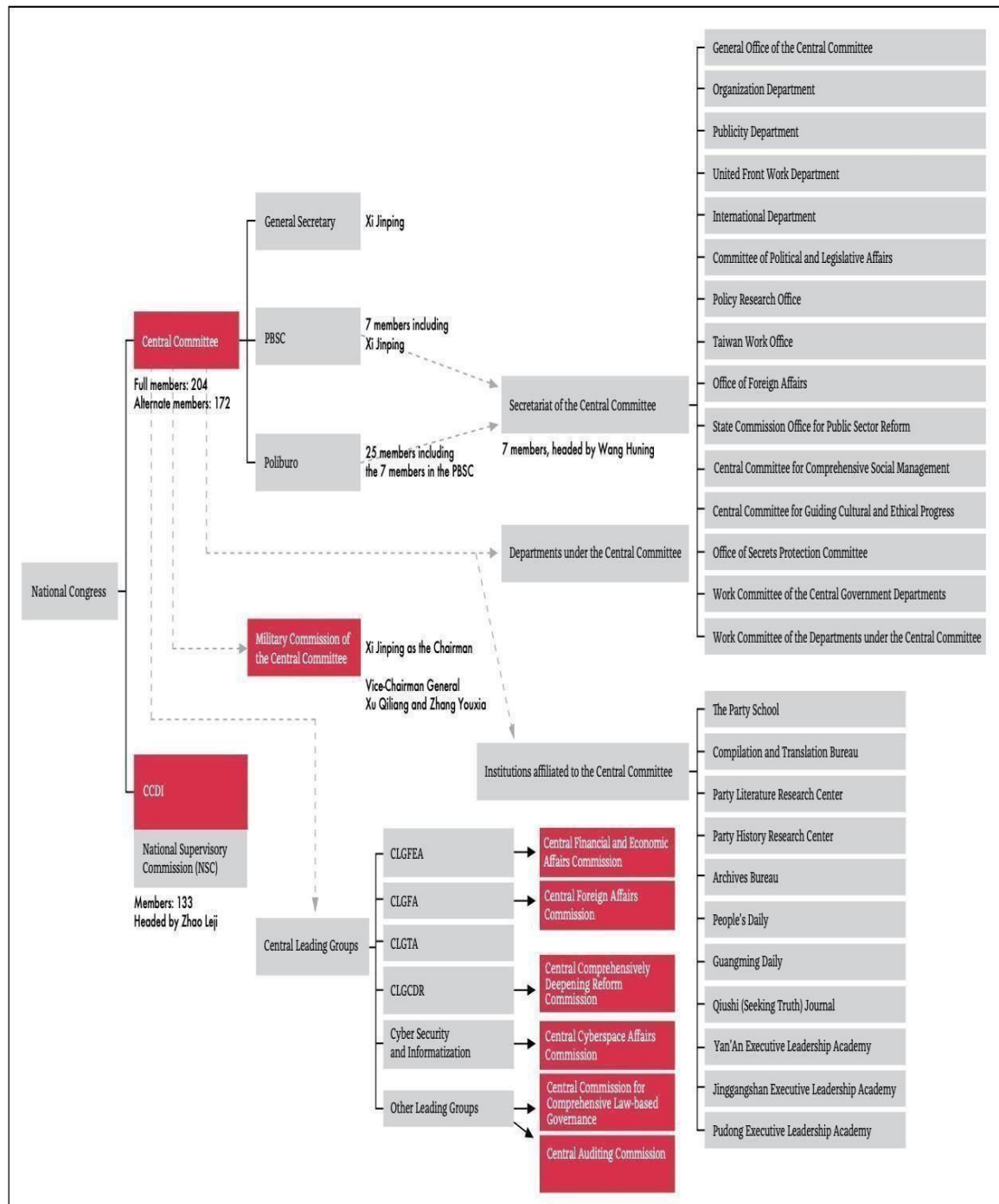
Major Institutional Patterns merupakan elemen yang melihat aspek pandangan pola-pola kelembagaan yang terdapat di suatu negara yang berperan dalam kebijakan luar negeri yang meliputi struktur, fungsi institusi formal & informal dalam lingkungan masyarakat yang memandu, berperan, & membangun pengambilan keputusan oleh pemerintah (Snyder, Bruck, & Sapin 1962, 60-65;Septiana, Rizki, & Makhroja, n.d., 1-18).

1. Pola Pengambilan Keputusan di dalam PKT

Di dalam struktur politik Partai Komunis Tiongkok, dua lembaga yaitu Politburo yang beranggotakan 25 orang dan Politburo Standing Committee (PSBC) yang beranggotakan 7 orang salah satunya yaitu Sekretariat Jenderal Partai (Xi Jinping) yang memegang kekuasaan tertinggi merupakan dua komite tertinggi dalam PKT sekaligus badan pembentuk keputusan tertinggi di Tiongkok. Pada tingkat kedua yaitu Sekretariat Komite Sentral, 2 komisi khusus di bawah Komite Sentral yaitu Komisi Militer Sentral & Central Commission for Discipline Inspection (CCDI) (He 2018, 3-29).

Pekerjaan utama Sekretariat Komite Sentral yaitu manajemen operasi harian Politburo & PSBC serta mengawasi departemen & komisi di bawah Komite Sentral. Lalu di bawah Komite Sentral terdapat kelompok- kelompok pimpinan pusat yang memegang peran utama yaitu Central Leading Group for Financial and Economic Affairs (CLGFEA), Central Leading Group for Foreign Affairs (CLGFA), & Central Leading Group for Taiwan Affairs (CLGTA), terkait koordinasi kebijakan dan konsultasi mengenai pengambilan keputusan di bidang yang ditekuni (He 2018, 3-29).

Gambar 2. 2 Struktur Tingkat Pusat Partai Komunis Tiongkok



(Sumber: He 2018, 6).

Dalam upaya penyatuan Taiwan, Central Leading Group of Taiwan Affairs (CLGTA), merupakan salah satu yang paling ditekuni dan dikembangkan dengan staf & kantor permanen sebagai lembaga yang setingkat dengan kementerian. Pada tingkat ketiga organisasi pusat yang terdiri dari berbagai departemen di bawah Komite Sentral yang memiliki tugas utama untuk mengelola berbagai urusan khusus sehari-hari di pusat partai dan melaksanakan kebijakan dalam partai. Di dalam otoritas pusat partai terdapat perangkat tertinggi *De facto* dalam sistem kekuasaan, Politburo & PBSC kedua badan ini merupakan badan pembuat keputusan terkait isu-isu penting yang berhubungan dengan ekonomi dan politik Tiongkok dengan persetujuan akhir Komite Sentral PKT terhadap keputusan yang di ambil, namun peran dari Komite Sentral PKT sifatnya hanya berupa memberi label legalitas saja karena keputusan telah di susun oleh anggota Politburo & PSBC. Secara eksplisit kebijakan yang paling penting dalam agenda pemerintahan PKT yaitu rencana 5 tahun, berbagai prinsip panduan & rencana strategis negara Tiongkok (He 2018, 3-29).

Departemen yang berperan dalam upaya penyatuan yaitu Taiwan Work Office, United Front Department Work (UFWD), & The Publicity Department. Departemen urusan Taiwan berfungsi mengatur kebijakan terhadap Taiwan dan upaya tujuan penyatuan nasional Tiongkok. Sedangkan UFWD berfungsi sebagai tangan kanan PKT yang mengawasi partai

internal di bawah PKT dan mempertahankan kebijakan Satu Tiongkok, menggalang dukungan terkait penyatuan, & mempromosikan penyatuan Tiongkok secara damai sebagai implementasi & dukungan dari kebijakan nasional PKT. Departemen publisitas bekerja sebagai agen propaganda, media, seni, budaya, & agama yang bertugas di dalam dan di luar negeri salah satunya terhadap upaya penyatuan lintas selat (He 2018, 3-29).

Dalam pengambilan keputusan terkait upaya penyatuan Taiwan, Xi memutuskan untuk menggunakan kembali kerangka yaitu “Konsensus 1992” & penawaran “Satu Negara, Dua Sistem” di ambil oleh lembaga-lembaga tertinggi seperti Politburo & PBSC, Xi Jinping sebagai Sekretariat Jenderal yang memimpin pengambilan keputusan dengan dukungan PBSC & Politburo yang secara spesifik menentukan arah kebijakan terhadap Taiwan. PBSC & Politburo juga mengadakan pertemuan 1 tahun sekali untuk membahas situasi darurat dan khusus secara tertutup. Upaya penyatuan Taiwan di bahas di dalam Kongres Nasional PKT & Kongres Rakyat Nasional yang diadakan setiap 5 tahun sekali. Kongres PKT ke 19 tahun 2017 menjadi wadah penerapan kembali “Konsensus 1992” & teori “Satu Negara, Dua Sistem” sebagai kerangka pengembalian Taiwan. Xi memutuskan bahwa penggunaan kembali kerangka kerja ini merupakan bagian dari insititusionalisasi kebijakan terhadap Taiwan yang di

ulang oleh struktur partai. “Konsensus 1992” sebagai dasar politik Tiongkok untuk menolak kemerdekaan Taiwan, konsep “Satu Negara, Dua Sistem” sebagai kerangka pemerintahan upaya penyatuan damai. Menyelesaikan permasalahan lintas selat di era baru yang terjadi pada Kongres Nasional PKT ke 20 pada tahun 2022, dalam kongres ini juga Xi menghapus janji untuk tidak menempatkan pasukan militer di Taiwan dan merilis buku putih (*White Paper third edition*) sebagai hasil keputusan terkait menyelesaikan masalah Taiwan di era baru (Taiwan question 2022). Keputusan ini di ambil berdasarkan arahan Politburo & PBSC yang dipimpin oleh Sekretariat Jenderal Xi Jinping & Komite Sentral melakukan pengesahan terhadap kebijakan nasional PKT untuk urusan Taiwan lalu menyerahkan pekerjaan tersebut kepada departemen yang bertanggung jawab yaitu Departemen Publisitas, UFWD, Kantor Urusan Taiwan, & CLGTA untuk melakukan pekerjaan mereka terhadap dukungan & upaya penyatuan lintas selat sebagai implementasi dari agenda nasional PKT (He 2018, 3-29).

2.2.3 Major Characteristic of Social Organization

Major Characteristic of Social Organization merupakan elemen yang melihat aspek keberadaan organisasi sosial yang berfungsi, dan beraksi dalam lingkungan masyarakat. Hal ini merangkum elemen struktural & fungsional yang dapat membedakan organisasi sosial dan bentuk komunikasi lainnya

(Snyder, Bruck, & Sapin 1962, 60-65;Septiana, Rizki, & Makhroja, n.d., 1- 18).

A. Peran Kelompok Organisasi

Kelompok yang mempromosikan upaya penyatuan Tiongkok umumnya tidak bersifat independen, melainkan kelompok terorganisir yang dijalankan oleh PKT sebagai perpanjangan suara pemerintah. Nantinya kelompok masyarakat ini digerakkan oleh UFWD yang bekerja sebagai tangan kanan PKT yang secara aktif menggalang dukungan penyatuan secara damai kepada warga Tiongkok dan warga Taiwan. Hal ini dibuktikan dengan adanya pesan yang disampaikan kepada masyarakat Taiwan saat menjelang pemilihan Presiden Taiwan yang dilakukan oleh kepala (Kantor Urusan Taiwan/*Guówùyuan Táiwān Shìwù Bàngōngshì*) di Tiongkok yang bernama Song Tao. Song mendorong proses penyatuan damai dan menegaskan kebijakan ini merupakan keinginan seluruh masyarakat pada 2 Januari 2024. Kantor urusan Taiwan di Tiongkok yang secara aktif mengajak masyarakat Taiwan untuk mendorong proses reunifikasi secara damai dan mempererat hubungan lintas selat melalui platform media & propaganda komputansi (Central News Agency 2024).

2.2.4 Role Differentiation and Specialization

Role Differentiation and Specialization merupakan elemen yang melihat aspek pembagian instruksi di dalam suatu organisasi ataupun pemerintahan. Adanya pembagian tugas individu yang

dimana negara atau aktor dalam proses pembentukan kebijakan memiliki tugas yang tidak sama dalam pembuatan keputusan (Snyder, Bruck, & Sapin 1962, 60-65; Septiana, Rizki, & Makhroja, n.d., 1-18).

A. Pembagian Tugas Dalam Upaya Penyatuan Taiwan

Terdapat spesialisasi peran yang mempercepat proses mobilisasi dan pengaruh upaya Tiongkok untuk melakukan penyatuan Taiwan dan menysar ke berbagai sektor masyarakat. Tiongkok menggunakan pembedaan tugas yang jelas yaitu PKT memegang teguh kontrol atas kebijakan Taiwan dengan adanya “Konstruksi Partai” sebagai bagian inti yang memungkinkan kepemimpinan PKT yang mahir dalam tujuan besar di Tiongkok. Lalu ada peran militer seperti PLA dan front persatuan, Tiongkok melibatkan strategi militer *Rezhan* dan front persatuan *Tong Zhan* sesuai yang tercantum dalam Pasal 2 “Peraturan tentang Kerja Front Persatuan PKT” meliputi buruh & tani, seluruh pekerja sosialis, pembangun perjuangan sosialis yang berguna untuk menghimpun & mempersatukan rakyat guna mendukung peremajaan bangsa Tiongkok. Terdapat *Rezhan* sebagai agen yang mempertahankan idoleogi dan perang informasi yang dibentuk oleh partai dari akademisi, penyiar dan kelompok siber & front persatuan kerja bertugas untuk menawarkan kekuatan lunak yang menargetkan hati dan pikiran rakyat Taiwan terhadap reunifikasi (Central People's Government of the People's Republic of China 2021).

Provinsi Fujian juga memainkan peran khusus dalam strategi Tiongkok kepada Taiwan yang menciptakan model integrasi emosional melalui adanya hubungan budaya & leluhur di Fujian terhadap masyarakat Taiwan. Adanya koordinasi yang dilakukan PKT terhadap UFWD yang peran ini dinilai membantu Tiongkok dalam mendukung upaya penyatuan politik dengan Taiwan dengan menyiapkan strategi dan berbagai aspek yang tersedia (Central People's Government of the People Republic of China 2023).

2.2.5 Groups: Kinds and Functions

Konsep kelompok, jenis, & fungsi membentuk pada berbagai jenis kelompok yang dimana kategori kelompok ini mempengaruhi pembentukan keputusan di dalam suatu negara dan tugas spesifik mereka dalam membangun kebijakan luar negeri yang meliputi pemerintah, bisnis, buruh, & politik. Adapun fungsi dari kelompok merujuk kepada kelompok advokasi, negosiasi, mobilisasi opini publik, & informasi (Snyder, Bruck & Sapin, 1962, 60-65; Septiana, Rizki, & Makhroja, n.d., 1-18).

A. Adanya Kesamaan Agama dan Budaya

Adanya peran kelompok agama & budaya yang digunakan PKT sebagai strategi untuk mempromosikan “Hubungan Spiritual” antara masyarakat di kedua belah sisi dengan menggunakan agama, budaya rakyat Tionghoa, & adat istiadat rakyat Tionghoa termasuk pemujaan *Mazu* merupakan pemujaan dewi laut lazim dilakukan masyarakat Tiongkok &

Taiwan yang tinggal di pesisir sebagai strategi pendekatan. (Tsinghua University Cross-Strait Development Institute, 2021). Selain itu organisasi “Fo Guang Shan” yang bekerja sama dengan komunitas Buddhis pimpinan master Hsing yun aktif dalam membangun hubungan sosial & politik yang mendukung persatuan dan jati diri budaya Tionghoa termasuk di Taiwan dan diaspora lainnya. Hal ini dibuktikan dengan adanya pembangunan vihara besar Fo Guang Shan di Taiwan sebagai sarana persatuan kedua sisi selat dalam aspek religius (Tencent News 2023).

Sedangkan dari Tiongkok adanya peran UFWD dalam menjalankan The Fujian Provincial Comitte di bawah pimpinan PKT yang mempromosikan pulau Fujian, adanya budaya *Hokkien & Mazu* yang dipercaya oleh masyarakat kedua sisi selat sebagai simbol persatuan budaya Tionghoa melalui interaksi budaya. UFWD juga berusaha mempropagandakan Fujian sebagai rumah atau tempat asal masyarakat Taiwan agar rekan senegara mereka tidak lupa akan budaya asli masyarakat Tionghoa (People’s Daily Online 2022).

B. Peran Kelompok Bisnis

Selain itu terdapat kelompok bisnis yang dimiliki oleh konglomerat asal Taiwan yaitu Tsai Eng-meng bernama Want-Want Company. Want melakukan investasi lintas selat secara masif di Tiongkok yang dimulai pada tahun 1990-an. Pada

tahun 2008, Want membeli kelompok media besar di Taiwan & Hongkong, langkah ini dilakukan bukan hanya soal kepentingan bisnis akan tetapi menyebarkan ideologi pro Tiongkok. Pemilik Want juga secara terbuka mendukung penyatuan damai demi meningkatkan hubungan lintas selat dan berperan menjadi jembatan penting antara forum lintas selat yang melibatkan pejabat tinggi & tokoh lintas selat yang mampu mempromosikan penyatuan (Dongwen Finance, 2022). Kelompok bisnis yang mendukung upaya penyatuan sangat minim selain Want karena kelompok bisnis di Taiwan cenderung menghindari isu terhadap penyatuan dan umumnya mereka hanya mengutamakan kepentingan yaitu bisnis dan investasi walaupun mereka mendukung kebijakan pro Tiongkok namun sifatnya ambigu karena dukungan ini kapan saja bisa berubah ketika rezim Tiongkok tidak lagi mendukung investasi dan kepentingan kelompok bisnis (Shen 2022). Sedangkan di Tiongkok sendiri kelompok bisnis lebih dikelola oleh pemerintah sebagai alat yang digunakan untuk membuka hubungan lintas selat dan upaya reunifikasi damai. Sehingga PKT bekerja sama dengan kelompok bisnis sebagai pendekatan ekonomi terhadap Taiwan (Institute of Literature, Chinese Academy of Social Science 2024).

BAB 3

FAKTOR EKSTERNAL & ANALISIS HASIL KEBIJAKAN

3.1 Faktor Eksternal

Faktor eksternal adalah secara umum mengacu kepada faktor yang didatangkan dari luar zona dan batas negara yang disebut juga sebagai reaksi dan respon dari negara lain terhadap aktor pengambil kebijakan di suatu negara (Snyder, Bruck, & Sapin 1962, 60-65; Al-Najjar & Husein 2022, 191-213).

3.1.1 *Non Human Environment*

Non Human Environment mengarah kepada elemen yang sifatnya bukan manusia dan keberadaannya juga tidak memiliki dampak secara instan terhadap lingkungan kehidupan manusia, namun berdampak terhadap proses pengambilan keputusan yang meliputi kondisi geografis negara lain, sejarah politik, kondisi budaya dan nilai ideologi, & kondisi sumber daya alam global yang termasuk sebagai struktur negara lain (Snyder, Bruck, & Sapin 1962, 60-65; Erdiatulha, Karjaya, & Rizki 2020, 1-14).

A. Perbedaan Sejarah Taiwan & Tiongkok

Terdapat perbedaan budaya yang terjadi akibat adanya penjajahan Jepang terhadap Taiwan disebabkan oleh adanya upaya untuk mendesak identitas dan budaya Jepang terhadap penduduk Taiwan. Peristiwa ini menimbulkan konflik yang melahirkan gerakan identitas Taiwan awal yang menolak

identitas Jepang dan secara perlahan menjauhkan diri dari Tiongkok yang dianggap tidak peduli terhadap penduduk Tiongkok yang berada di Taiwan yang secara tidak langsung membentuk identitas Taiwan yang mulai terpisah dari pemerintah Tiongkok. Selain itu walaupun Taiwan dijadikan sebagai pos pertanian oleh Jepang mereka relatif tidak mendapatkan penindasan layaknya Tiongkok dan penduduk Taiwan juga terisolasi dari peristiwa gejolak Tiongkok setelah revolusi. Selain itu adanya perbedaan narasi sejarah Taiwan terhadap Jepang dimana mereka tidak menganggap Jepang sebagai antagonis dan kaum muda Taiwan cenderung memeluk pandangan warga dunia sebagai “Cosmopolitan” untuk membangun hubungan dengan komunitas Asia Timur lainnya, hal ini tidak sejalan dengan pandangan Tiongkok (Lorenzo 2024, 39-45).

B. Perbedaan Budaya & Politik Taiwan

Dalam aspek politik & budaya Chiang Kai-sek menyampaikan pesan bahwa rezim KMT memegang prinsip kedaulatan Sun Yat-sen yang memiliki arah untuk membangun rezim demokrasi di seluruh Tiongkok. Pesan yang di sebarakan melalui pidato dan kampanye pendidikan oleh Chiang Kai-sek dengan tujuan untuk mempropagandakan bentuk demokrasi yang menonjolkan akuntabilitas substansial kepada rakyat. Sikap ini membulatkan harapan terkait demokrasi yang diyakini hingga saat ini Tiongkok tidak akan memenuhi komitmen ini

jika reunifikasi terjadi. Pada akhir tahun 1980-an & 1990-an, Taiwan melakukan transisi demokrasi liberal yang berakar dari AS sebagai munculnya sistem politik dan nilai-nilai baru di Taiwan (Lorenzo 2024 39-45).

Walaupun etos liberal & sistem demokrasi liberal belum berjalan sempurna akan tetapi masyarakat Taiwan sudah terbiasa dengan pemilu, kemandirian, hak yang mereka dapatkan, & terdapat kebebasan ekonomi & politik yang lebih besar dari Tiongkok. Oleh karena itu faktor lain adanya penolakan penyatuan yaitu masyarakat Taiwan menganggap diri mereka berbeda dari Tiongkok karena keberhasilan sistem demokrasi liberal yang masyarakat Taiwan bangun dan pertahankan sendiri. Adanya transisi identitas dan politik masyarakat Taiwan yang mempengaruhi pandangan Taiwan dalam mengambil keputusan dan menghadapi sikap Tiongkok. Peristiwa ini menimbulkan sentimen nasionalisme terhadap Tiongkok meningkat setiap tahunnya (Lorenzo 2024, 39-45). Selain itu Taiwan juga menganggap bahwa Tiongkok memusuhi Taiwan dengan berupaya secara aktif melemahkan legitimasi pemerintahan Taiwan beserta lembaga politik Taiwan. Adanya faktor ini secara alami memperkuat narasi sentimen negatif terhadap Tiongkok yang membingkai di dalam identitas masyarakat Taiwan (Lorenzo 2024 39-45).

Bagi Tsai ing-wen adanya perbedaan ideologi politik, sistem pemerintahan & identitas kedaulatan yang menjadi

pembeda antara budaya dan identitas nasional di kedua belah sisi, perbedaan ini terbentuk dari adanya peristiwa sejarah yang panjang serta menjadi syarat mutlak Taiwan tidak pernah menjadi bagian dari Tiongkok. Tiongkok yang menganut komunisme yang tertanam dari Marxisme-Leninisme walaupun sudah di adaptasi ke budaya lokal Tiongkok. Taiwan yang menjunjung tinggi kebebasan dan demokrasi dalam politiknya tidak akan pernah bisa bekerja sama dengan sistem pemerintahan otoriter yang dijalankan oleh Tiongkok. Presiden Tsai secara tegas mendefinisikan Taiwan merupakan negara yang berdaulat serta meminta Tiongkok untuk berkomitmen menghormati keputusan masyarakat Taiwan yang memperjuangkan demokrasi dan kebebasan individu dalam ruang lingkup masyarakat (Taiwan Work Office of the CPC Central Committee 2020).

3.1.2 Other Cultures

Other Cultures merujuk kepada kebudayaan dari negara lain yang menjadi acuan penting dalam proses pengambilan keputusan dan perumusan kebijakan luar negeri di suatu negara. Faktor yang menjadi penyangga dari elemen ini yaitu nilai-nilai budaya, norma, & praktik di negara lain (Synder, Bruck, & Sapin 1962, 60-65; Erdiatulha, Karjaya, & Rizki 2020 1-14).

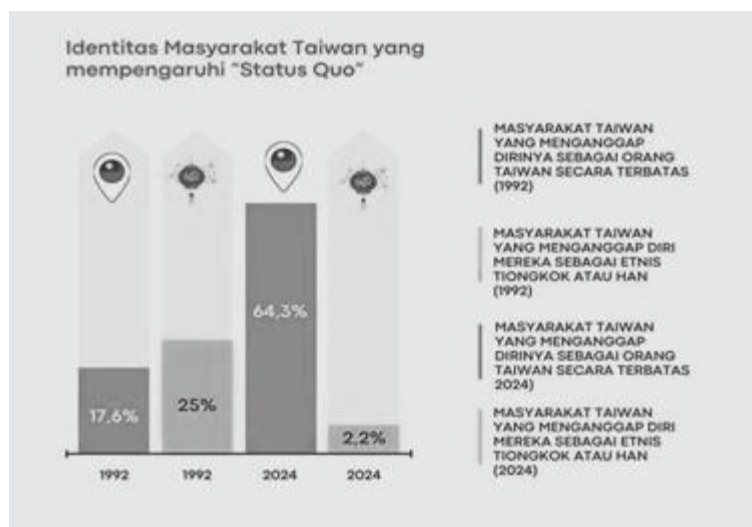
A. Identitas Masyarakat Taiwan

Meskipun Tiongkok dan Taiwan merupakan mayoritas etnis yang sama yaitu etnis Han dan juga menganut konfusianisme, Taoisme & Buddhisme. Akan tetapi masuknya

budaya asing yang dinilai Tiongkok sebagai kebudayaan lain selain nilai-nilai religius & prinsip hidup bangsa Tionghoa yaitu adanya demokrasi liberal dan agama lain seperti Kristen. Hal ini dinilai oleh Tiongkok sebagai budaya asing dan wujud nyata adanya intervensi asing di Taiwan sehingga penelitian ini menggunakan budaya Taiwan yang menganut demokrasi liberal yang di anggap Tiongkok sebagai kebudayaan lain sebagai dampak dari intervensi asing (Ho 2022).

Selain itu juga elit politik Taiwan juga banyak belajar dan mengambil ilmu politik dari pandangan Barat sehingga mempengaruhi pengambilan keputusan terhadap Taiwan. Adanya pengaruh budaya asing secara substansial menciptakan pandangan budaya lain berpengaruh terhadap proses penyatuan kembali terhadap Tiongkok (Ho 2022). Selain itu Taiwan saat ini menerapkan proses De-sinisasi. Proses ini menunjukkan identitas nasionalnya yang diperoleh dari adanya karakteristik individu yang mencakup bahasa, budaya, & tujuan bersama. Pertumbuhan budaya demokrasi yang muncul di Taiwan memiliki peran dalam munculnya identitas nasional yang berpusat kepada orang Taiwan sehingga proses ini yang dinamakan sebagai “De-Sinisasi” (Taiwan Politics 2024).

Grafik 3. 1 Tren Penentangan Publik Taiwan Terhadap Isu Reunifikasi 2020-2024



(Sumber: Taiwan Politics 2024)

Adanya identitas yang muncul dalam budaya masyarakat Taiwan memiliki konotasi yang intens terhadap adanya *status quo* karena munculnya identitas nasional Taiwan memberikan peran sentral dalam pergerakan kemerdekaan Taiwan. Adanya gerakan pengakuan identitas nasional ini pun membuahkan hasil sebab semakin sedikit masyarakat Taiwan secara individu mengakui diri mereka sebagai “Orang Tionghoa”. Hal ini dibuktikan dengan adanya tingkat persentase pada tahun 1992, terdapat 17,6% masyarakat Taiwan yang menganggap diri mereka sebagai orang Taiwan secara terbatas, dan 25,5% mengakui diri mereka sebagai orang Tionghoa belaka. Lalu pada tahun 2024 terdapat sekitar 64,3% penduduk Taiwan mengakui diri mereka sebagai orang Taiwan, dan hanya terdapat 2,2% yang mendefinisikan diri mereka sebagai orang Tionghok (Taiwan Politicsm 2024). Hal ini menyebabkan

ancaman oleh pemerintah Tiongkok terhadap Taiwan sebab identitas nasional Taiwan yang saat ini di bentuk oleh pengalaman historis dan politik yang berbeda dari Tiongkok. Walaupun secara bahasa budaya & spiritual memiliki kesamaan akan tetapi identitas nasional Taiwan dibangun bukan hanya dari kesamaan budaya & bahasa akan tetapi pengalaman sejarah, kolonial dan demokrasi sehingga masyarakat Taiwan ingin menentukan nasib mereka sendiri yang berbeda dari Tiongkok. Munculnya konsep pembedaan “Diri Sendiri” dari budaya yang lain tentunya akan mengganggu tujuan politik Tiongkok untuk penyatuan nasional (Taiwan Politics 2024)

Sebab adanya peristiwa masyarakat Taiwan yang semakin menemukan jati diri mereka dengan nilai-nilai kebebasan, demokrasi, & kesejahteraan sosial yang membuat mereka semakin berbeda dari budaya Tiongkok secara tidak langsung akan berpengaruh terhadap keinginan masyarakat Taiwan mengenai kebijakan Tiongkok untuk bergabung ke kedaulatan Tiongkok (Taiwan Politics 2024). Identitas utama negara Taiwan sangat erat hubungannya dengan sistem demokrasi yang dijalankannya sejak negara itu berdiri di bawah rezim KMT. Namun Tiongkok tetap menganggap bahwa budaya Tiongkok merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Taiwan, adanya pemutusan hubungan ini secara paksa akan melibatkan terjadinya krisis identitas budaya di Taiwan dan

memperparah Taiwan dalam situasi politik lintas selat (Banxia Jing 2024).

3.1.3 Other Societies

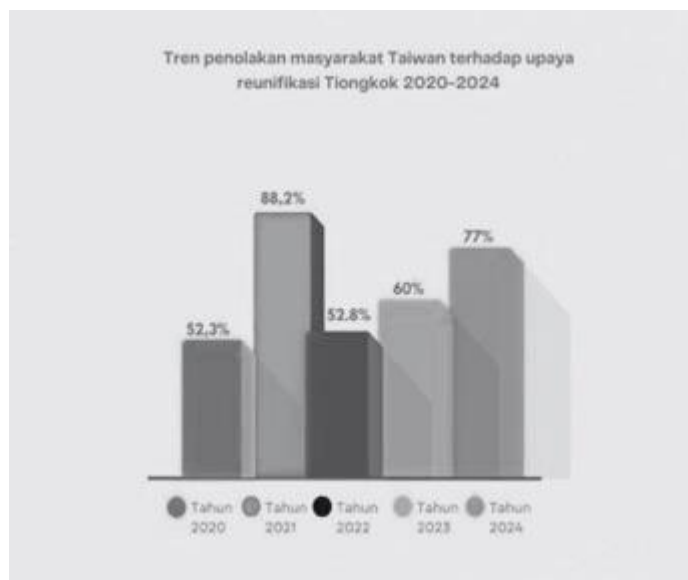
Merujuk kepada masyarakat lain yang berupa kelompok-kelompok masyarakat yang berada di luar negeri yang ditinjau dari adanya opini publik, pandangan masyarakat internasional terhadap suatu negara, desakan dari kelompok-kelompok masyarakat, & organisasi non pemerintahan. Adanya variabel ini sangat penting dalam mempertimbangkan perumusan kebijakan luar negeri. Negara akan mempertimbangkan untuk pembentukan diplomatik dengan melihat respon dan reaksi dari masyarakat internasional (Synder, Bruck, & Sapin 1962, 60-65; Erditulha, Karjaya, & Rizki 2020, 1- 14).

A. Sikap Masyarakat Taiwan Terhadap Isu Reunifikasi

Meskipun masyarakat Tiongkok menganggap bahwa masyarakat otoritas Taiwan sebagai bangsa Tiongkok dalam penelitian ini masyarakat lain merujuk kepada faktor eksternal masyarakat di luar zona Daratan Tiongkok yaitu Otoritas Taiwan. Terdapat prinsip serta pandangan yang bimbang terhadap stabilitas & situasi wilayah yang mereka tinggalkan saat ini, terdapat kubu yang terbagi di kalangan masyarakat Taiwan. Kubu pertama merupakan kelompok masyarakat yang setuju dengan adanya penyatuan demi keselamatan dari bahaya perang dan hidup yang nyaman, kubu kedua merupakan negara yang menganggap bahwa kemerdekaan mengerikan akan

tetapi menolak untuk penyatuan, kubu ketiga yaitu mempertahankan *status quo* & berlandung di bawah payung perlindungan “ Tidak boleh ada perang” (cn.chosun.com 2024).

Grafik 3. 2 Tren Penentangan Publik Taiwan Terhadap Isu Reunifikasi 2020-2024



(Sumber: Strait Flying Rainbow 2020; dw.com 2021; Taiwan Public Opinion Foundation 2022; VOACHinese.com 2023; cn.chosun.com 2024).

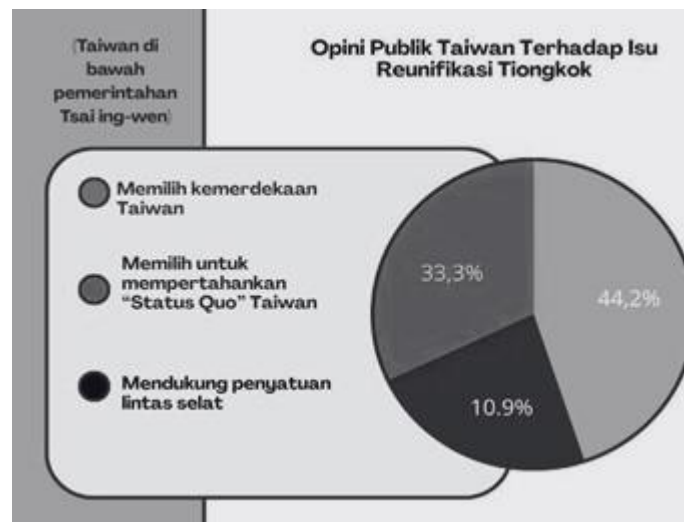
Persentase tren masyarakat Taiwan yang menentang persatuan sejak 2020-2024 tercatat bahwa pada tahun 2020 sejumlah 52,3% (Strait Flying Rainbow 2020), pada tahun 2021 sejumlah 88.2% (dw.com 2021), pada tahun 2022 sejumlah 52,8 % (Taiwanese Public Opinion Foundation 2022), pada tahun 2023 sejumlah 60% (VOACHinese.com 2023), dan pada tahun 2024 sejumlah 77% dari seluruh total penduduk Taiwan secara tegas menolak adanya upaya penyatuan terhadap negara di kedua sisi selat. Jajak pendapat ini diambil setelah adanya

kunjungan Presiden Taiwan yang baru terpilih yaitu Lai Ching-tee ke pangkalan militer yang bernama Hualien untuk mengetahui laporan dari petugas militer Taiwan terkait kondisi keamanan di lintas selat. Presiden Lai yang mendengar hasil laporan yang disampaikan oleh petugas militer Taiwan bahwasanya kondisi di lintas selat tetap tegang dan pemerintah Tiongkok masih membiarkan PLA melakukan latihan di sekitar wilayah kedaulatan Taiwan yang dianggap sebagai latihan koordinasi oleh Tiongkok. Lai pun semakin memperkuat sikap kepemimpinannya yang anti terhadap pemerintahan Tiongkok dan mendukung kebijakan kemerdekaan serta pemisahan Tiongkok-Taiwan di bawah partai DPP. Lai memberi tahu kepada masyarakat untuk tetap waspada kepada tindakan Tiongkok bila sewaktu waktu terjadi peristiwa di luar kendali (cn.chosun.com 2024).

Yayasan Opini Publik melakukan riset opini publik negara Taiwan mengenai “Kecenderungan Penyatuan atau Kemerdekaan” dan “Identitas nasional rakyat Taiwan”, riset ini dilakukan pada bulan Januari 2024. Penelitian jajak pendapat terhadap publik Taiwan ini melibatkan 1.083 orang dewasa/masyarakat Taiwan yang berusia di atas 20 Tahun. Riset ini memperoleh sebanyak 44,2% masyarakat Taiwan memilih kemerdekaan Taiwan, sebanyak 10,9% masyarakat memilih penyatuan lintas selat, dan sebanyak 33,3% masyarakat memilih mempertahankan *status quo* negara

Taiwan (VOA 2024).

Grafik 3. 3 Opini Publik Taiwan Terhadap Isu Reunifikasi di Era Presiden

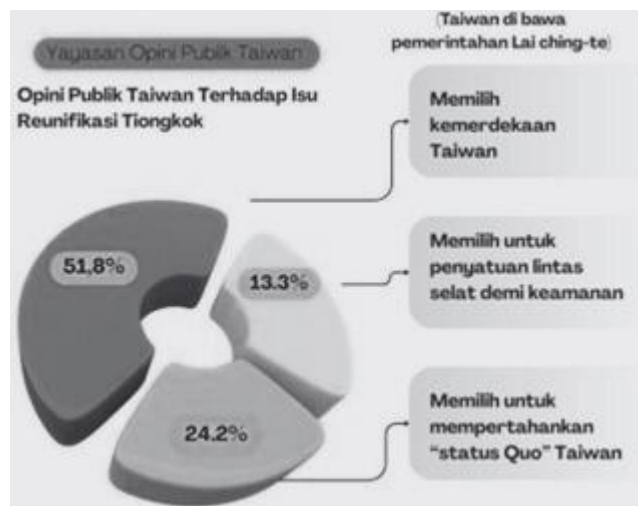


(Sumber: VOA 2024)

Menurut You Ying-lung yang menjadi ketua sekaligus penanggung jawab dalam riset ini, ia mengatakan bahwa sejak Presiden Lai Ching-tee memenangkan pemilihan presiden pada tahun 2024, adanya kecenderungan penyatuan & kemerdekaan di kalangan masyarakat Taiwan telah mengalami kenaikan secara signifikan, perbandingan ini dibuktikan dengan adanya riset yang sama dilakukan pada tanggal 9-11 Desember 2024, yang hasilnya di publikasikan ke media publik pada tanggal 30 Desember 2024. Jumlah orang yang menginginkan kemerdekaan pada masa kepemimpinan Presiden Lai berjumlah 51,8% dari 44,2%, jumlah orang yang berharap mempertahankan *status quo* menurun 24,2% dari 33,3% & jumlah orang yang mengharapkan reunifikasi meningkat sebesar 2,4 poin dari 10,9% menjadi 13,3%. Jumlah masyarakat Taiwan yang ingin merdeka naik sebesar 7,6 poin,

menurut penelitian ini adanya kenaikan ini terjadi akibat semakin banyaknya harapan masyarakat Taiwan yang mengharapkan negara yang mereka tinggalkan untuk merdeka sepenuhnya serta mampu mempertahankan *status quo* mereka, masyarakat Taiwan juga semakin mengenal jati diri mereka yang dianggap berbeda dengan masyarakat Tiongkok yang membatasi kesejahteraan masyarakat dan demokrasi publik. Masyarakat Taiwan sangat menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia & demokrasi yang dianggap sebagai warisan leluhur bangsa Tionghoa pada zaman kekaisaran. Hal inilah yang menyebabkan ancaman eksternal bagi Tiongkok (VOA 2024).

Grafik 3. 4 Opini Publik Taiwan Terhadap Isu Reunifikasi di Era Lai Ching-tee



(Sumber: VOA 2024)

Adanya tindakan provokatif Tiongkok terhadap Taiwan sejak masa pemilu dan terpilihnya Presiden Lai menjadi ancaman terhadap agenda bersejarah Tiongkok untuk melakukan penyatuan dengan jalan damai terlebih dengan adanya prinsip kepemimpinan Lai yang semakin menjauhkan

Taiwan dari Tiongkok (CNN Indonesia, 2024). Sebab Tiongkok yakin bahwa walaupun mayoritas dari masyarakat Taiwan meningkat untuk pro terhadap pemisahan dan kemerdekaan, akan tetapi masih ada masyarakat Taiwan yang memahami jati diri mereka dan berharap untuk kembali ke tanah air mereka yang sebenarnya yaitu Tiongkok. Hal ini juga didorong oleh motivasi PKT yang memanfaatkan hubungan kerja sama dengan partai oposisi yang berada di Taiwan seperti Taiwan People's Party (TTP) & KMT, kedua partai ini memiliki pandangan pro terhadap pemerintahan Tiongkok dan menganggap hubungan lintas selat merupakan saudara yang tidak dapat dipisahkan serta mendukung kebijakan yang sama antara kerja sama Tiongkok & AS. Dengan adanya partai oposisi ini tentunya akan membuka peluang bagi pemerintahan Tiongkok untuk terus mempromosikan upaya reunifikasi dengan Taiwan (9DASHLINE 2024).

A. Sikap Tegas Tsai Ing-wen Menolak Penyatuan

Ketika Tsai Ing-wen dari partai DPP pro kemerdekaan Taiwan memimpin pemerintahan. Tsai secara tegas menolak adanya pendekatan Tiongkok dan menolak isi “Konsensus 1992” yang di dalamnya terdapat penawaran “Satu Negara, Dua Sistem” terhadap Otoritas Taiwan (Wicaksono 2017, 655-674). Adapun alasan Tsai menolak isi “Konsensus 1992” yang ditawarkan oleh Xi karena beberapa alasan, Tsai menganggap isi “Konsensus 1992” sudah jauh dari komitmen Tiongkok

dalam menerapkan upaya reunifikasi yang damai & adil dalam mendekati Taiwan. Selain itu terdapat revisi di dalam isi konsensus yang menurunkan minat Tiongkok dalam pernyataan “Melakukan penyatuan kembali dengan jalan damai”, dan wujud nyata yang ditampilkan Tiongkok berupa Hongkong & Makau yang sempurna di dalam pemerintahan Tiongkok sudah tidak relevan, sebab adanya permasalahan Hongkong dengan Tiongkok terkait masalah UU Ekstradisi 2019 & UU Keamanan Nasional 2020, menjadi fondasi yang kokoh mengapa Tsai mundur dalam penawaran ini (U.S.Department of Defense 2021).

3.1.4 *Societies Organized and Functioning as States Government Action*

Dalam elemen struktur sosial, organisasi, & interaksi masyarakat sosial menjelaskan bagaimana masyarakat yang terwujud dan terstruktur dalam bentuk negara yang berfungsi dan bersosialisasi dalam proses pengambilan kebijakan luar negeri. Adapun karakteristik utama pada elemen ini yaitu struktur sosial, perilaku masyarakat, interaksi internasional seperti pertukaran budaya, perdagangan dan pertukaran diplomasi (Synder, Bruck, & Sapin 1962, 60-65; Erdiatulha, Karjaya, & Rizki 2020, 1-14).

A. Interaksi Budaya Tiongkok-Taiwan

Adanya interaksi budaya yang dilakukan antara Tiongkok-Taiwan yang berbentuk pertukaran budaya & pendidikan di kedua sisi lintas selat bertujuan untuk masyarakat agar saling mengenal antara satu dan lainnya. Tiongkok mendukung semua

sektor untuk melaksanakan interaksi budaya sebagai upaya soft power Tiongkok untuk mempengaruhi masyarakat Taiwan. Taiwan juga menyambut hangat adanya interaksi budaya yang terjalin sebagai implementasi budaya Taiwan yang lunak dan menjunjung tinggi demokrasi, kebebasan, keberagaman, & keterbukaan (Executive Yuan 2020).

Adanya upaya untuk memperdalam pertukaran seni budaya lintas selat dan saling memberi prestasi kreatif, pemerintah memotivasi kalangan seni lintas selat untuk saling bekerja sama. Para ahli budaya dan kreatif lintas selat dapat memahami keberagaman budaya dan membangun tali persaudaraan yang menyadarkan mereka bahwasanya bangsa Tiongkok dan bangsa Taiwan memiliki satu ras keturunan yaitu bangsa Tionghoa yang nantinya membuka peluang terhadap upaya reunifikasi dengan jalan damai (Taiwan Work Office of the CPC Central Committee 2022).

Interaksi budaya yang berhasil dilaksanakan oleh kedua belah sisi dibuktikan dengan adanya acara penyelenggaraan kegiatan pertukaran budaya lintas selat yang berjudul “Budaya bersama, ikatan keluarga bersama” pada tanggal 28 Oktober - 1 November 2023, Taiwan mengirim delegasi untuk mengunjungi Hunan, Huaihua, & Zhijiang untuk merasakan budaya tradisional Tiongkok (Three Hunan United Front 2023). Namun adanya gerakan “De sinisasi” yang dilakukan oleh

masyarakat Taiwan untuk mempromosikan jati diri mereka yang menjadi penghambat adanya upaya Tiongkok untuk melakukan modernisasi politik secara damai. Adanya gerakan ini yang semakin menjauhkan masyarakat Taiwan terhadap Tiongkok (www.Huaxia.com 2024).

B. Intervensi Amerika Serikat terhadap Taiwan

Adanya kerja sama antara AS-Taiwan yang bermula pada tahun 1950 ketika AS & Taiwan meratifikasi perjanjian pertahanan, adanya perjanjian ini melibatkan komitmen AS yang akan terus mendukung negara Taiwan dan menolak adanya RRT. Lalu ketika Tiongkok & Uni Soviet mengalami penurunan hubungan diplomatik yang disebabkan oleh konflik Sino-Soviet Border pada akhir dekade 1950-an. AS yang kala itu melihat adanya peluang emas untuk mendapatkan kesempatan untuk membangun diplomatik dengan Tiongkok mengingat kala itu mereka memiliki musuh yang sama yaitu Uni Soviet (Ryabushkin, n.d., 73-91).

Syarat pertama upaya untuk memperbaiki hubungan AS-Tiongkok yang harus dipenuhi yaitu AS harus mengakui RRT sebagai negara yang sah secara diplomatik oleh Amerika Serikat. Selain itu sebagai syarat pembangunan normalisasi terhadap Tiongkok, AS juga harus membatalkan perjanjian pertahanan dengan Taiwan yang diratifikasi pada tahun 1950 dan juga perjanjian terjalannya hubungan formal dengan Taiwan pada bidang pertahanan tahun 1980. Namun pada tahun 1979

ketika AS sudah berhasil memulihkan dan mendapatkan hubungan diplomatiknya dengan Tiongkok, AS melakukan manuver dalam menjalankan politik luar negerinya terhadap Tiongkok, AS kembali menjalin hubungan non diplomatik dengan Taiwan melalui perjanjian Taiwan Relations Act (TRA). Perjanjian internasional ini bukanlah resmi, akan tetapi perjanjian domestik AS yang disahkan oleh Kongres AS & ditandatangani oleh Jimmy Carter (Presiden AS ke 39) (Congressional Research Service 2024,1-3).

Di dalam TRA mengandung aturan hubungan masyarakat AS- Taiwan dan terdapat keputusan yang berbunyi “Presiden AS harus memperhitungkan keterlibatan AS dalam membela Taiwan apabila RRT memutuskan untuk menerjunkan operasi militer di Taiwan dengan tujuan kekerasan & intimidasi demi tercapainya tujuan politik Tiongkok terhadap Taiwan”, adanya keterangan ini di dalam TRA karena AS melihat situasi negosiasi permasalahan antara kedua negara lintas selat, Tiongkok tidak pernah berkomitmen untuk tidak menggunakan kekerasan dalam melakukan negosiasi politiknya (Stanford Report 2022).

Lembaran fakta terbaru yang membahas hubungan AS-Taiwan yang dirilis pada tahun 2022, United States Department of States (DOS) menyatakan bahwa AS-Taiwan memiliki ikatan tidak resmi yang kuat dan mendefinisikan bahwa Taiwan

sebagai mitra utama AS di kawasan Indo-Pasifik dan AS-Taiwan memiliki kuantitas yang sama, hubungan komersial, serta ekonomi yang mengikat satu dan lainnya. AS menyatakan bahwa adanya hubungan antar masyarakat yang kuat dalam menganut sistem demokrasi bernegara menjadi modal utama keterikatannya AS & Taiwan (Congressional Research Service 2024,1-3).

Di bawah kepemimpinan Presiden Joe Biden, AS masih mengakui kebijakan Satu Tiongkok namun dipandu dengan TRA yang memiliki 3 ketentuan di antaranya:

1. Hubungan AS-Taiwan akan dijalankan melintasi institut AS di Taiwan yaitu American Institute in Taiwan (AIT), sebuah perseroan swasta. AIT melaksanakan tugas yang sama seperti kedutaan AS yang terdapat di negara lain.
2. AS berkomitmen memberikan logistik, pertahanan, & fasilitas pertahanan yang sesuai.
3. Dalam melawan kekerasan, pemaksaan, & kejahatan merupakan tugas AS untuk menciptakan perdamaian (Congressional Research Service 2024,1-3).

Lalu menjelang pemilu AS tahun 2024, Pejabat senior Joe Biden pada bulan November 2023, menjelaskan bahwa Presiden Biden telah menjelaskan secara rinci kepada Presiden Xi mengenai kebijakan AS yaitu:

1. AS tidak mendukung Taiwan dalam meraih kemerdekaan, AS tidak mendukung adanya perubahan sepihak terkait

status quo dari kedua belah sisi.

2. AS menunjang adanya upaya dialog lintas selat, AS dengan keinginan penuh berharap kedua belah pihak menemukan jalan keluar dan titik temu dari permasalahan dengan cara yang damai serta perbedaan antara kedua belah sisi diterima dengan baik antara masyarakat Tiongkok & Taiwan.
3. AS Tidak akan mengambil tindakan terhadap penyelesaian sengketa lintas selat asalkan permasalahan ini diselesaikan secara damai (Congressional Research Service 2024,1-3).

Tiongkok melihat eksistensi TRA dalam politik luar negeri AS terhadap Taiwan menimbulkan sikap “Ambiguitas Strategis” dalam permasalahan Taiwan. Di dalam TRA tidak dijelaskan secara spesifik & akurat apakah AS akan membela Taiwan jika Tiongkok melakukan invasi atau menggunakan kekerasan untuk mencapai tujuan politik di Taiwan. Sifat ambiguitas ini semakin diperjelas pada tahun 2021, Presiden Biden menyatakan sebanyak 4 kali akan memihak kepada Taiwan & keputusan ini tidak akan berubah. Presiden Trump yang menjalani periode kedua sebagai pemimpin AS pada bulan November 2024, mengatakan bahwa Taiwan harus membayar jaminan asuransi kepada AS dengan membayar pertahanan AS untuk melayani keamanan & kekayaan Taiwan dalam menghasilkan pasokan teknologi & semikonduktor. Trump menilai Tiongkok tidak akan menggunakan kekerasan pada masa jabatannya akan tetapi Tiongkok di masa depan akan

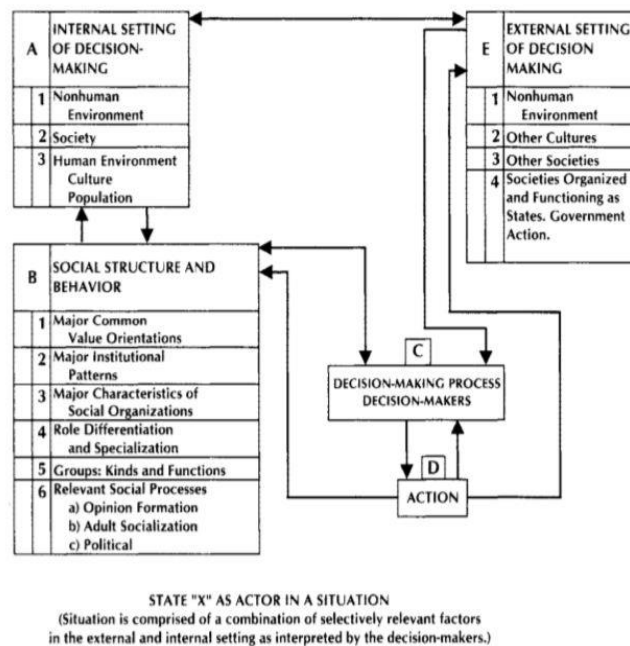
semakin gerah (Global News 2024).

Dalam sidang mengenai “Kebijakan AS terhadap Taiwan” yang diadakan oleh Komite Hubungan Luar Negeri Senat Kongres AS, AS memuji perkembangan UU Hubungan Taiwan dan memaparkan keberhasilan hubungan ini selama Biden menjabat mengenai pertukaran resmi cabang eksekutif AS-Taiwan, & bantuan persenjataan Taiwan. AS juga membantu Taiwan dalam mengembangkan apa yang mereka sebut sebagai “Ruang Internasional”. Tiongkok menganggap tindakan ini merupakan pencerobohan prinsip Satu Tiongkok & Tiga Komunike Tiongkok-AS. Tiongkok juga menganggap AS mencederai hukum internasional, norma dasar hubungan diplomatik, serta melanggar kedaulatan integritas Tiongkok (Global News 2024). Sikap AS terhadap Taiwan menjadi bukti nyata bahwa AS sedang berusaha menyingkirkan prinsip Satu Tiongkok & secara langsung berupaya melibatkan diri dalam urusan domestik Tiongkok. Adanya pemulihan UU hubungan AS-Taiwan dilakukan pada tahun 1979 dalam tempo waktu 41 hari saja setelah AS memperoleh pengesahan hubungan diplomatik dengan Tiongkok, anggota Kongres AS yang skeptis terhadap Tiongkok secara sigap langsung meratifikasi adanya UU non formal ini (Global News 2024).

Sejak awal adanya perjanjian non formal AS-Taiwan, Tiongkok menganggap bahwa perjanjian tersebut ilegal & tidak sah secara hukum. Tiongkok secara tegas menentang adanya

undang-undang tersebut. Ketika delegasi AS mengunjungi Tiongkok untuk pertama kalinya sejak hubungan kedua negara tersebut dipulihkan pada tanggal 19 April 1979. Deng Xiaoping secara tegas menekan delegasi AS bahwa Tiongkok tidak senang dengan adanya UU hubungan Taiwan yang disahkan oleh Kongres AS. Permasalahan paling umum stabilitas RUU ini tidak sepenuhnya membenarkan adanya prinsip Satu Tiongkok, bagi Tiongkok hal ini tidak dapat dibenarkan lagi. Namun sudah hampir 46 tahun AS masih menggunakan UU hubungan Taiwan yang disusun secara sepihak oleh AS sebagai senjata pelindung bagi AS agar terlibat dalam urusan dalam negeri Tiongkok (Wenzhao 2022, 8).

Gambar 3. 1 Bagan Teori Decision Making Model



Tabel 3. 1 Tabel Analisis Teori Kebijakan

No	Definisi Teori	Hasil Penelitian
1.	Faktor Internal (Internal Setting of Decision Making)	a. Non human environment: Kondisi geografis Tiongkok & Taiwan yang strategis sebagai jalur perdagangan maritim serta masalah keamanan bagi Tiongkok yang berada di antara sekutu AS (Jepang, Filipina & Thailand.) Terdapat kesamaan budaya Tiongkok-Taiwan dan bukti sejarah yang memperkuat Taiwan bagian dari Tiongkok. b. Society: Dukungan penuh rakyat Tiongkok terhadap upaya pemerintah untuk menegakkan nilai-nilai nasionalisme, kebudayaan Tiongkok dan kebangkitan nasional. c. Human Environment: Dukungan partai domestik Tiongkok di bawah PKT, ideologi negara yang menegakkan prinsip Satu Tiongkok sebagai identitas bangsa, model kepemimpinan Xi Jinping yang menargetkan kebangkitan nasional dan tindakan tegas dalam upaya penyatuan. Munculnya tekanan elit politik terkait kepemimpinan Xi dalam internal partai PKT terkait penyelesaian masalah lintas selat
2.	Struktur sosial & perilaku (social structure & behavior)	a. Major Common Value Orientation: Nilai nasionalisme yang menjadi alat Xi Jinping untuk menarik dukungan rakyat & elit politik yang memperkuat legitimasi kebijakan penyatuan. b. Major Institutional Patterns: Struktur internal pemerintahan PKT di Tiongkok dan pengambilan kebijakan oleh PBSC & Politburo yang dipimpin oleh Presiden Xi Jinping terkait penyelesaian masalah Taiwan didukung penuh oleh institusi & ideologi negara. c. Major Characteristic of Social Organizations: Dukungan organisasi masyarakat yang diawasi ketat oleh lembaga negara UFDW dan kantor urusan Taiwan sebagai perpanjangan tangan pemerintah dalam mendapatkan dukungan di lingkungan sosial internal.

		d. Role Differentiation and Specialization: Pembagian kebijakan dan Instruksi dalam mendukung kebijakan pemerintah terkait upaya penyatuan PKT sebagai lembaga utama mencapai tujuan besar Tiongkok, rezhan sebagai agen perang informasi & ideologi , tongzhan margetkan hati dan pikiran rakyat Taiwan. e. Group Kinds & Fuction: Peran kelompok agama fo guang shan & buddhis chinesse , fujian komite dalam propaganda penyatuan melalui spiritual. Kelompok bisnis (Want Company) berperan sebagai jembatan negosiasi dan hubungan lintas selat.
No.	Definisi Teori	Hasil Penelitian
3.	Proses pembuatan kebijakan- aktor pembuat kebijakan (Decision-Making Process Decision-Making)	a. Proses pembuatan kebijakan oleh aktor pengambil kebijakan merupakan konjungsi antar variabel yang ada. Proses pembuatan kebijakan oleh aktor pembuat kebijakan merupakan negara Tiongkok yang dilakukan oleh institusi Partai Komunis Tiongkok dan dilakukan oleh lembaga partai yang bernama Sekretaris Jenderal (Presiden Xi Jinping), Politburo Standing Committe (PBSC/ 7 orang) dan Politburo (25 orang). Pengambilan keputusan dilakukan sangat tertutup dan mendapatkan pengawasan ketat PKT. Pada kongres partai ke 19 (2017) Xi Jinping yang diarahkan oleh PBSC & Politburo mengambil kebijakan terkait masalah Taiwan dengan mengaktifkan kembali klausul 1992 sebagai dasar politik Tiongkok menolak kemerdekaan Taiwan yang memuat konsep strategis “Satu Negara, Dua Sistem” sebagai kerangka penyatuan secara damai terhadap Taiwan untuk kerangka kerja jangka panjang. b. Lalu pada kongres ke 20 (2022) dengan melihat situasi Taiwan yang belum melunak di bawah rezim DPP dan isu terhadap upaya pemisahan semakin kuat. Xi Jinping dengan arahan PBSC & Politburo merilis “White Paper” edisi ke tiga sebagai rumus

		menyelesaikan masalah Taiwan di era baru. Selain itu memutuskan untuk mencabut janji pemerintah untuk tidak menggunakan kekuatan militer terhadap Otoritas Taiwan.
4.	Tindakan (Action)	a. Dalam menyikapi masalah Otoritas Taiwan, pemerintah Tiongkok telah berupaya untuk melakukan pendekatan dan strategi terhadap hubungan lintas selat. Tiongkok membangun interaksi budaya antara Tiongkok-Taiwan yang dimana para seniman dan delegasi dari Taiwan melakukan kunjungan ke tempat bersejarah Tiongkok dengan tujuan masyarakat agar saling mengenal dan membuka hati dan pikiran rakyat Taiwan bahwa mereka bersaudara. Tiongkok juga menjalin kerja sama kepada partai oposisi di Taiwan (TTP&KMT) untuk menawarkan upaya penyatuan dan menyebarkan propaganda penyatuan di Taiwan. Tiongkok juga menggandeng konglomerat dan pebisnis asal Taiwan untuk mempererat hubungan lintas selat sebagai kekuatan lunak. Tiongkok melakukan intervensi dalam pemilu di Taiwan untuk mempengaruhi rakyat Taiwan dan melakukan latihan militer sebagai tindakan Tiongkok untuk melindungi Taiwan dari intervensi asing & kelompok separatis sebagai pendekatan yang agresif.
No.	Definisi Teori	Hasil Penelitian
5.	Faktor eksternal (External setting of decision- making)	a. Non Human Environment: penjajahan Jepang yang membentuk identitas dan perbedaan narasi sejarah Taiwan terhadap Tiongkok. Adanya reformasi politik demokrasi liberal sebagai prinsip hidup rakyat Taiwan. b. Other Cultures: Proses de-sinisasi yang membentuk kebudayaan dan identitas bangsa Taiwan yang mengandalkan kebebasan, kemandirian dan individual kolektif yang menjadi ancaman baru bagi Tiongkok mengenai kebudayaan lain yang masuk dan beradaptasi menjadi identitas masyarakat Taiwan c. Other Societies: Adanya sikap rakyat Taiwan melihat upaya penyatuan sebagai kondisi yang menakutkan serta

		menolak adanya sikap Tiongkok yang ingin melindungi dan menentukan masa depan Otoritas Taiwan. d. Societies Organized and Fuctioning as States, Government Action: Tiongkok mendorong interaksi budaya sebagai strategi ain dalam membukan hubungan lintas selat sebagai kekuatan lunak untuk mempegaruhi masyarakat melalui delegasi & seniman. Intervensi AS yang juga merupakan faktor negara lain dalam sikap Tiongkok menyelesaikan masallah Taiwan sebagai ancaman nyata intervensi asing di Otoritas Taiwan.
--	--	--

BAB 4

KESIMPULAN REKOMENDASI

4.1 Kesimpulan

Melalui hasil penelitian di atas maka penulis dapat menarik kesimpulan melalui faktor *internal*, dapat diketahui bahwa adanya masalah yang belum selesai dampak dari penjajahan bangsa Jepang terhadap Tiongkok yang memisahkan antara Tiongkok dan Taiwan sehingga menimbulkan perbedaan yang menciptakan konflik berkepanjangan mengenai identitas bangsa Tiongkok dan Taiwan. Adanya dukungan rakyat, tekanan elit politik & ideologi partai yang memperkuat legitimasi pengambilan kebijakan. Sedangkan dari faktor social structure & behavior terdapat nilai nasionalisme yang menjadi alat politik Xi Jinping membangun dukungan rakyat dan elit politik, peran kelompok organisasi sosial, bisnis & agama sebagai perilaku masyarakat terkait kebijakan pemerintah yang memperkuat legitimasi kebijakan mengenai penyatuan nasional hingga proses pengambilan kebijakan oleh struktur pemerintahan pusat terkait masalah Taiwan yang didukung penuh oleh institusi dan ideologi negara di bawah rezim Xi Jinping terkait penyelesaian masalah Taiwan di era baru.

Selain itu dalam faktor *Eksternal* adanya peristiwa penjajahan yang menimbulkan distrik dan rakyat Taiwan merasa terabaikan oleh perhatian dinasti Tiongkok, perbedaan budaya, ideologi demokrasi liberal, gerakan “De-Sinisasi” yang membentuk identitas Taiwan, &

intervensi AS yang dinilai Tiongkok menjadi ancaman bagi kedaulatan Tiongkok, hal ini juga menjadi alasan tindakan agresif Tiongkok terhadap Taiwan meningkat. Dengan melihat fenomena yang terjadi baik di internal maupun eksternal Tiongkok, menggunakan elemen yang terstruktur di dalam kerangka teori, bahwa upaya yang dilakukan Presiden Xi Jinping & PKT memiliki tujuan untuk melakukan modernisasi & melindungi kedaulatan Tiongkok dari campur tangan asing sebagai pelajaran Tiongkok di masa lalu. Selain itu penyatuan Tiongkok juga menjadi salah satu agenda Presiden Xi dalam upaya mencapai target kebangkitan nasional pada tahun 2035 dan kemakmuran bangsa Tiongkok untuk mengejar persaingan geopolitik Tiongkok melawan AS agar mengimbangi kekuatan adidaya. Adanya identitas bangsa yang kuat menjadi salah satu modal utama Tiongkok dalam mencapai negara sosialis komunis yang kuat & makmur pada tahun 2049 yang bertepatan dengan 100 tahun berdirinya Republik Rakyat Tiongkok (Wicaksono 2017, 655- 674).

4.2 Rekomendasi

Berdasarkan proses penelitian mengenai upaya Tiongkok di bawah Xi Jinping dalam upaya reunifikasi sebagai bagian dari Peremajaan Nasional dan Modernisasi Bangsa. Penelitian selanjutnya bisa mengulas apa saja upaya Xi yang dilakukan pada tahun 2024 sampai tahun 2027. Karena target utama Xi dan PKT mengembalikan Taiwan pada tahun 2027 yang bertepatan dengan hari jadi ke 100 tahun angkatan bersenjata Tiongkok (PLA) yang nantinya akan memiliki kesinambungan dengan penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Sumber Daya Alam Mineral Tiongkok. Alasan China Tetap Impor Batu Bara RI Meski Punya Cadangan Raksasa .(2022). <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20220806131900-85-831102/alasan-china-tetap-impor-batu-bara-ri-meski-punya-cadangan-raksasa#:~:text=Alasan%20China%20Tetap%20Impor%20Batu%20Bara%20ORI%20Meski%20Punya%20Cadangan%20Raksasa,-CNN%20Indonesia>
- Alamsyah, A. A. (2023). Peran Cina dalam Mengoptimalkan Kerjasama Ekonomi BRICS untuk Mencapai Tujuan Pembangunan Bersama. *Jurnal Perdagangan Internasional*, 1(2), 112–127. <https://doi.org/10.33197/jpi.v1i2.1533>
- Ambisi Presiden XiJinping dalam melakukan upaya penyatuan daratan Cina. Pidato Tahun Baru Xi: China “Pasti Akan Bersatu Kembali” dengan Taiwan. (2024). <https://www.voaindonesia.com/amp/pidato-tahun-baru-xi-china-pasti-akan-bersatu-kembali-dengan-taiwan-/7419869.html>
- Amrita Jash. (2024). PLA military activities around Taiwan territory. China’s Military Exercises Around Taiwan: Trends and Patterns. <https://globaltaiwan.org/2024/10/chinas-military-exercises-around-taiwan-trends-and-patterns/>
- Arthur S. Ding. (2021). Chinese Politics and Foreign Policy under Xi Jinping The Future Political Trajectory (Arthur S. Ding & Jagannath P. Panda, Eds.).
- A. Xiao. (2022). If Xi Jinping does not resolve the Taiwan issue, the party will face. Analysis: why Taiwan is so important to Chinese leader Xi Jinping. . <https://amp.abc.net.au/article/101367290>
- Bang Xiao. (2022). Reunification of Taiwan. Analysis. Why Taiwan is so important to Chinese leader Xi Jinping <https://amp.abc.net.au/article/101367290>
- Bentuk Pemerintahan Tiongkok. Ada Parpol Lain di China Kenapa Hanya Partai Komunis yang berkuasa? (2021). <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20221014150836-113-860636/ada-8-parpol-lain-di-china-kenapa-hanya-partai-komunis-yang-berkuasa/amp>
- Campagnola, D. (2024). Understanding the Status Quo between Taiwan and China: International Law, the Power Transition Theory and Case Studies. *Taiwan Politics*. <https://doi.org/10.58570/001c.124430>
- Chandran Nair. (2023). Anti- China Rhetoric. Anti- China Rhetoric Is Off the Charts in Western Media. <https://thedi diplomat.com/2023/02/anti-china-rhetoric-is-off-the-charts-in-western-media/>
- China’s conflict against Taiwan. Transcript of the Ministry of National Defense’s Regular Press Conference in April 2024.(2024). <http://www.mod.gov.cn/gfbw/xwfy/jt/16303674.html>
- China’s non - CPC Political. China’s non- CPC political parties make joint statement on Pelosi visit. (2022). http://english.scio.gov.cn/m/chinavoices/2022-08/05/content_78358541.htm
- China-Taiwan’s Conflict. Mainland China suspends tariff arrangements on 134 item under Taiwan trade deal. (2024). <https://www.scmp.com/economy/china-economy/article/3264787/mainland-china-suspends-tariff-arrangements-134-items-under-taiwan-trade-deal>
- Chinese Communist Party. The historical mission and action value of the communist

- party of China. (2021). <https://www.12371.cn/2021/08/26/ARTI1629943705228350.shtml>
- Chinese Communist Party. Xi Jinping Speech at the Conference Celebrating the 100th. (2021). <http://politics.people.com.cn/n1/2021/0701/c1024-32146259.html>
- Chinese geopolitics. (Special Report by Bauhinia) The US's efforts to contain China will ultimately be in vain. (2024). https://zijing.com.cn/article/2024-05/31/content_1246068374825652224.html
- Commentary Understanding the One China policy Steven M. Goldstein. (2023). The History of One China Policy. Understanding the One China policy. <https://www.brookings.edu/articles/understanding-the-one-china-policy/>
- Cross-strait relations. The Zhijiang Cross-Strait Ethnic Minority Exchange and Cooperation Base held a series of cross-strait cultural exchange activities entitled "Shared Feelings, Culture and Family Ties". (2023). https://mzw.hunan.gov.cn/mzw/xxgk_71281/gzdt/ywbd/202312/t20231208_32474373.html
- D. Pratiwi. (2021). Kebijakan One China Policy Terhadap Taiwan. IMPLIKASI ONE CHINA POLICY TERHADAP KEMERDEKAAN TAIWAN, Jurnal Ilmu Pemerintahan , 2(1), 256-258. <https://www.journal.unwira.ac.id/index.php/WG/article/download/919/471>
- Dannielle Maguire. (2022). Reunification of Taiwan. Why does China want Taiwan when it's already so big and rich? The Answer is about more than land and money. <https://amp.abc.net.au/article/101321856>
- Davide Campagnola. (2024). Status Quo between Taiwan and China. The status quo between Taiwan and China: The inevitability of a dramatic end? <https://doi.org/10.58570/001c.125900>
- Diajukan, S., Persyaratan, M., Gelar, M., Sosial, S., Sos, S., Putri, O. :, & Wulandari, A. (2016). POLITIK LUAR NEGERI TIONGKOK TERHADAP UPAYA KEMERDEKAAN TAIWAN PADA MASA PRESIDEN HU JINTAO (2003-2013).
- Dimasti Dano. (2023). Dalam Perspektif Ekonomi, Mungkinkah Reunifikasi China-Taiwan Dilakukan Melalui Jalan Damai. Jurnal Inovasi Hasil Penelitian Dan Pengembangan , 3. Dinamika politik tiongkok - taiwan. Tahun ini china lakukan aksi terbesar kedua masuki zona pertahanan taiwan. (2022). <https://www.voaindonesia.com/amp/tahun-ini-china-lakukan-aksi-terbesar-kedua-masuki-zona-pertahanan-taiwan-/6596669.html>
- Economics of Taiwan and China. Tang Yonghong: Is Taiwan's economic dependence on the mainland too high? . (2022). <http://column.chinadaily.com.cn/a/202203/15/WS622feb21a3107be497a0af0b.html>
- Fang-Yu Chen, & Ya-Han Chen. (2024). Taiwan's Pro China. TAIWAN'S PRO-CHINA OPPOSITION IN CONGRESS PASS UNDEMOCRATIC LAWS THAT TRIGGER MASS PROTEST. <https://www.9dashline.com/article/taiwans-pro-china-opposition-in-congress-pass-undemocratic-laws-that-trigger-mass-protest> Filip Leskovsky. (2024). Taiwan's Foreign Ministry rejects One-China principle.
- Frederik Kelter. (2024). Reunification of Taiwan. For many Chinese, there are "more important things" than Taiwanunification.

- <https://www.aljazeera.com/amp/news/2024/3/15/for-many-chinese-there-are-more-important-things-than-taiwan-unification>
- Geopolitical Challenges of China. China's Geopolitical Aspirations and Challenges. . (2022). <https://www.morganstanley.com/im/en-us/individual-investor/insights/articles/chinas-geopolitical-aspirations-and-challenges.html>
- Geopolitical Challenging of China. Geopolitical & economic outlook 2024: Instability in China and global security. . (2024). <https://www.thomsonreuters.com/en-us/posts/global-economy/geopolitical-economic-outlook-2024-china-global-security/>
- HF Firman, & A. Wibowo. (2024). Isu One China Policy dalam Politik Internasional. PENGARUH KEBIJAKAN ONE CHINA POLICY TERHADAP KEDAULATAN WILAYAH NEGARA TAIWAN DITINJAU DARI HUKUM INTERNASIONAL. 1.
- How Important Taiwan is for the United States. U.S. Relations With Taiwan. . (2022). <https://www.state.gov/u-s-relations-with-taiwan/#:~:text=Taiwan%20has%20become%20an%20important,consistent%20across%20decades%20and%20administrations>
- Howard Shen. (2024). Economics of Taiwan. Taiwan's Surprising Drop in Trade Dependence on Mainland China. . <https://thediplomat.com/2024/03/taiwans-surprising-drop-in-trade-dependence-on-mainland-china/>
- Hudson, V. M. (2002). Foreign Policy Decision-Making. In Foreign Policy Decision-Making (Revisited) (pp. 1–20). Palgrave Macmillan US. https://doi.org/10.1057/9780230107526_1
- I Annual Report to Congress: Military and Security Developments Involving the People's Republic of China Military and Security Developments Involving the People's Republic of China. (2023). <https://media.defense.gov/2024/Dec/18/2003615520/-1/-1/0/MILITARY-AND-SECURITY-DEVELOPMENTS-INVOLVING-THE-PEOPLES-REPUBLIC-OF-CHINA-2024.PDF>
- If Taiwan is successfully controlled, China will be able to contain the power of the United States. (2024). <https://www.aninews.in/news/world/asia/what-if-china-gains-control-of-taiwan20240820120211/>
- Indira Lintang. (2023). Sumber Daya Alam Mineral Dunia. Daftar Negara Penghasil Nikel Terbesar di Dunia, Apakah Indonesia Pertama? from <https://www.inilah.com/deretan-negara-penghasil-nikel-terbesar-di-dunia>
- Irpan Maulana, & PP Hajiansyah. (2022). Reunifikasi dan Dinamika Politik Tiongkok dan Taiwan. INTERVENSI AMERIKA SERIKAT APABILA REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK MENGINVASI TAIWAN,. United States Intervention If the People's Republic of China Invades Taiwan. https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/88639637/SSRN_id4128011libre.pdf?1657929428=&response-content-disposition=inline%3B+filename%3DIntervensi_Amerika_Serikat_Apabila_Repub.pdf&Expires=1719053926&Signature=FKvxH56FyGqFPPLtdY91YemcDE8yx00zVwQuNPwC-AEqmIYJ
- Isu Keamanan Lintas Selat. Beijing: Komunike G7 Arogansi, Terlalu Ikut Campur Urusan Cina. . (2023). <https://www.tempo.co/internasional/beijing->

- komunike-g7-penuh- arogansi-terlalu-ikut-campur-urusan-cina-196533
Isu Keamanan Lintas Selat. KTT G7 Keluarkan Komunike, Tegaskan Pentingnya Perdamaian dan Stabilitas di Selat Taiwan. (2022).
<https://nspp.mofa.gov.tw/nsppid/news.php?unit=434&post=221317>
- Julian Toniovich. (2025). Pembersihan Politik Tiongkok. Xi Jinping Katakan Korupsi Jadi Ancaman Terbesar di China.
<https://www.inibalikpapan.com/xi-jinping-katakan- korupsi-jadi-ancaman- terbesar-di-china/>
- Kepemimpinan Presiden Xi Jinping Dalam Periode Ke Tiga. Apa Pengaruh Xi Jinping Jadi Presiden China 3 Periode bagi Dunia? (2022).
<https://www.cnnindonesia.com/internasional/20221025070332-113-864895/apa- pengaruh-xi-jinping-jadi-presiden-china-3-periode-bagi-dunia/2>
- Kepemimpinan Xi Jinping. Mantan Menteri Kehakiman China Dihukum Seumur Hidup, Korupsi atau Politis? . (2022).
<https://www.tempo.co/internasional/mantan-menteri- kehakiman-china- dihukum-seumur-hidup-korupsi-atau-politis--285747>
- Kerja Sama Amerika Serikat & Taiwan. Kepala Kantor Perwakilan Taiwan di AS Bertemu dengan Ketua DPR Mike Johnson. (2024).
https://id.taiwantoday.tw/news_amp.php?unit=463,464,465,466&post=247202
- Konflik tiongkok - taiwan. Konflik china-taiwan memanaskan setelah sejumlah diplomat baku hantam di fiji. . (2020).
<https://www.bbc.com/indonesia/dunia-54477658>
- Konflik Tiongkok Taiwan. Presiden Taiwan : Invasi China Tidak Mungkin Terjadi Sekarang.(2023). <https://www.voaindonesia.com/amp/presiden-taiwan-invasi-china- tidak- mungkin-terjadi-sekarang/7378347.html>
- Laura He. (2022). China hits Taiwan with Trade. China hits Taiwan with trade restrictions after Pelosi visit. .
<https://www.cnn.com/2022/08/03/economy/china-suspends- imports-taiwan-products-intl-hnk>
- Lawrence, & Susan V. (2024). Taiwan: Background and U.S Relations. https://src-h.slav.hokudai.ac.jp/coe21/publish/no16_2_ses/03_ryabushkin.pdf
- Lindsay Maizland, & Clara Fong. (2025). Conflict Between China and Taiwan. Why China- Taiwan Relations Are So Tense.
- Lorenzo, D. J. (2024). Why Do Many Taiwanese Resist Unification with the People's Republic of China?: An Overview of Explanations. In JOURNAL OF INDO- PACIFIC AFFAIRS □MAY. <http://english.scio.gov.cn/>.
- M. Wicaksono. (2021). (MEMAHAMI CHINA (Sejarah Peradaban dan Politik Negeri Tirai Bambu). PT. ELEX MEDIA KOMPUTINDO. 721080070S.
- Madoka, F. (2022). The characteristics of Xi Jinping's policy-making on Taiwan affairs: the conflict between institutionalization and centralization. *Journal of Contemporary East Asia Studies*, 11(2), 244–263.
<https://doi.org/10.1080/24761028.2023.2177094>
- ME. Pradana. (2023). Kebijakan luar negeri Amerika Serikat Terhadap Tiongkok. From Engagement to Containment? Perubahan Politik Luar Negeri Amerika Serikat Terhadap Tiongkok. *Jurnal Ilmu Hubungan Internasional*, 3(1), 45–59. <https://ojs.unsulbar.ac.id/index.php/lino/article/download/2353/1285/>
- Mentari Puspadini. (2023). Meningkatnya Tensi Tiongkok terhadap Intervensi

- Amerika di selat Taiwan. China Murka ke AS , Lakukan Ini di Taiwan. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20230820143030-4-464430/china-murka-ke-as-lakukan-ini-di-taiwan/amp>
- Michael Wicaksono. (2017). Republik Rakyat China (Indonesian Edition). ELEX MEDIA KOMPUTINDO.
- Mu Chunshan. (2021). Reunification of Taiwan. Who Wants to See a War Over Taiwan? . <https://thediplomat.com/2021/11/who-wants-to-see-a-war-over-taiwan/>
- Nationalism of China. "Patriotism is the core of the Chinese national spirit". . (2024). http://www.qstheory.cn/laigao/ycjx/2024-10/13/c_1130209360.htm#
- Nationalism Spirit of China. "Orthodox China", Nostalgia" and the Nationalist Frenzy: The Evolution of Taiwan in Chinese Public Opinion. . (2022). <https://chinadigitaltimes.net/chinese/685485.html>
- Partai Domestik Tiongkok. Ada 8 Parpol lain di China, Kenapa Hanya Partai Komunis yang Berkuasa. (2022). <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20221014150836-113-860636/ada-8-parpol-lain-di-china-kenapa-hanya-partai-komunis-yang-berkuasa/amp>
- Pemilu Taiwan 2024. Menlu Taiwan Buka-Bukaan soalPemilu dan Campur Tangan China. (2024) <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20240112201229-113-1048877/menlu-taiwan-buka-bukaan-soal-pemilu-dan-campur-tangan-china>
- Pengaruh Invasi Rusia ke Ukraina Terhadap Konflik Tiongkok & Taiwan. Menlu Joseph Wu : Perang Rusia - Ukraina Sadarkan Dunia bahwa Tiongkok juga Mungkin Menyerang Taiwan. . (2023). https://id.taiwantoday.tw/news_amp.php?unit=463&post=244189&unitname=Politik&postname=Menlu-Joseph-Wu%3A-Perang-Rusia-Ukraina-Sadarkan-Dunia-bahwa-Tiongkok-juga-Mungkin-Menyerang-Taiwan
- People's Daily: the historical trend is unstoppable- Why is the important system of "one country,two systems" completely feasible. (2020). https://www.gdtzb.gov.cn/llyj/txlj/content/mpost_82526.html
- Peran Taiwan dalam Perekonomian Global. Taiwan Kini Penguasa Semikonduktor Global. (2021). <https://mediaindonesia.com/ekonomi/374435/taiwan-kini-penguasa-semikonduktor-global>
- Perseteruan Panjang Antara AS dan China. 8 Penyebab Utama Hubungan AS dan China Kian Memanas. . (2020). <https://www.liputan6.com/amp/4313047/8-penyebab-utama-hubungan-as-dan-china-kian-memanas>
- Politics, defense, diplomacy. Cross-strait relations. (2020). <https://www.ey.gov.tw/state/B099023D3EE2B593/8f16df5d-c00c-44df-8c38-35adb7845102>
- Qualitative Data. Qualitative Data – Definition, Types, Analysis, and Examples. (n.d.). Retrieved May 24, 2025, from <https://www.questionpro.com/blog/qualitative-data/>
- Respon Tiongkok terhadap tindakan Provokasi Taiwan dan Amerika Serikat Terhadap Tiongkok. Tanggapi Provokasi, Tiongkok Gelar Latihan Serangan di Sekitar Taiwan. (2022). <https://www.medcom.id/internasional/asia-pasifik/wkB267qk-tanggapi-provokasi-tiongkok-gelar-latihan-serangan-di-sekitar-taiwan>

- Reunification of Taiwan. Analysis : Why Taiwan is so important to China's leader Xi Jinping. (2022). <https://amp.abc.net.au/article/101367290>
- Reunification of Taiwan. National reunification is a historical necessity for the great rejuvenation of the Chinese nation- The white paper "The Taiwan Issue and China's Reunification in the New Era "has aroused strong repercussions. (2022). http://www.news.cn/politics/2022-08/11/c_1128905724.htm
- Reunification of Taiwan. Poll: 55% of Chinese support military reunification , more than 20% believe reunification is not necessary. (2023). <https://www.cna.com.tw/news/acn/202305210141.aspx>
- Reunification of Taiwan. The Taiwan Question and China's Reunification in the New Era. . (2022). http://us.china-embassy.gov.cn/eng/zgyw/202208/t20220810_10740168.htm
- Reunification of Taiwan. Which Chinese people are more supportive of “military reunification” with Taiwan? . (2024). <https://www.cw.com.tw/article/5130515>
- Reunification of Taiwan. Taiwan has been Chinese territory since ancient times. . (2024). http://ph.china-embassy.gov.cn/sgdt/202403/t20240318_11261917.htm
- Reunification of Taiwan. That the mainland threatens Taiwan's security depends on the West can be stopped. (2021). http://paper.people.com.cn/rmrbhwb/html/2021-07/16/content_3058352.htm
- Reunifikasi tiongkok taiwan di bawah pemerintahan Xi Jinping. Xi sebut china pasti akan bersatu kembali dengan taiwan. . (2024). <https://m.antaranews.com/amp/berita/3895083/xi-sebut-china-pasti-akan-bersatu-kembali-dengan-taiwan>
- Rfi. (2022). Taiwan's Political Issue. Why is Taiwan important at the center of the geopolitical vortex? <https://www.rfi.fr/cn>
- Rizki Roza. (2023). Peningkatan Tekanan China Terhadap Taiwan dan Potensi Instabilitas Kawasan . XV.
- ROC.Taiwan-org. (2024). Taiwan mengutuk latihan militer Tiongkok karena merusak perdamaian dan stabilitas di Selat Taiwan dan kawasan. Taiwan menyerukan kepada semua lapisan masyarakat di Indonesia untuk meminta Tiongkok berhenti meningkatkan ketegangan regional.
- Roy Lee. (2022). China hits Taiwan with Trade. China's agricultural bans don't yet threaten Taiwan's economic security. <https://eastasiaforum.org/2022/12/10/chinas-agricultural-bans-dont-yet-threaten-taiwans-economic-security/>
- Ryabushkin, D. (n.d.). Origins and Consequences of the Soviet-Chinese Border Conflict of 1969 Prelude to the Military Clash.
- S. Ito. (2024). Transformation of China's Policy Towards Taiwan- What's Novel about China's Taiwan Trade Barrier Investigation. <https://www.jiia.or.jp/en/column/2024/04/china-fy2023-02.html>
- S. Jadhav. (2019). Decision Making Conceptual Theory. A Conceptual Study of Decision Making and Thoughtful Decisioning, (Politics). https://elsevier-ssrn-documentstoreprod.s3.amazonaws.com/19/07/02/ssrn_id3413706_code2983271.pdf?response-content-disposition=inline&X-Amz-SecurityToken=IQoJb3JpZ2luX2VjEDkaCXVzLWVhc3QtMSJGMEQCIFD667achx

- xkvDdv AtZLHAOZ3bNWJ8mSCthi5e4t5V3VAiA3iT5hFwY%2FPx
 Secondary Data. Secondary Research: Definition, Methods and Examples. (n.d.).
 Retrieved May 24, 2025, from
<https://www.questionpro.com/blog/secondary-research/>
- Shang-su Wu. (2021). Economics of Taiwan. CHINA'S pineapple ban exposes Taiwan's vulnerability. . <https://eastasiaforum.org/2021/04/24/chinas-pineapple-ban-exposes-taiwans-vulnerability/>
- Sikap Tiongkok Terhadap Hubungan AS & Taiwan. Tiongkok Peringatkan Amerika Tidak Ikut Campur Urusan Taiwan. (2023).
<https://rri.co.id/internasional/534305/tingkok-peringatkan-amerika-tidak-ikut-campur-urusan-taiwan>
- Sumber Daya Alam Mineral Tiongkok. 10 Negara Penghasil Minyak Terbesar diDunia, Amerika Serikat Tertinggi. . (2024).
<https://data.goodstats.id/statistic/10-negara-penghasil-minyak-terbesar-di-dunia-amerika-serikat-tertinggi>
 btwtg#:~:text=Menurut%20Energy%20International%20Administrations%20
- Sumber Daya Alam Mineral Tiongkok. Tiongkok Gas Alam: Impor. . (2023).
<https://www.ceicdata.com/id/indicator/china/natural-gas-imports>
- T. Wenzhao. (2022). During his visit to China, Deng Xiaoping expressed dissatisfaction with the US and Taiwan's endless legal violations of the one-China policy. Adhere to the one-China Principle (Commemorating the 50th Anniversary of the publication of the Sino-US Shanghai Communiqué. <http://hprc.cssn.cn/gsyj/wjs/dwgx/202206/P020220621353836322332.pdf>
- T. Wenzhao. (2024). A "confession" of the United States intervening in the Taiwan issue and interfering in China's internal affairs, Comments "A "confession" of the United States intervening in the Taiwan issue and interfering in China's .
https://m.thepaper.cn/newsDetail_forward_27452284
- Taiwan and China. The Publicity department of the CPC Central Committee held a press conference on the development of cross-strait relations and work related to Taiwan since the 18th CPC National Congress. (2022).
http://www.gwytb.gov.cn/zt/djzt/xxxcgc/zgzs/202209/t20220921_12471899.htm
- Taiwan Democratic Self-Government League. Taiwan Democratic Self-Government League pledges to strengthen popular will for national reunification. (2023). <https://english.news.cn/20230305/c0fcff128f6f4f52b8dfa84d609dd3cc/c.html>
- Taiwanese Cultural. The Myth of "De-Sinicization". Taiwan's Cultural An. . (2024). <https://www.huaxia.com/c/2024/10/15/1968364.shtml>
- Taiwanese Polling of Unification. Taiwan's latest poll: More than half of Taiwanese want independence, nearly 80% dislike the CCP. (2024). from <https://www.voachinese.com/a/poll-shows-over-half-taiwanese-prefer-independence-20241230/7919384.html>
- Taiwanese Public Opinion Foundation. (2022). www.tpof.org. Taiwanese respondents about Reunification. 76.6% of Taiwanese residents oppose unification....Lai Ching-te takes office 100 days later, cross-strait confrontation intensifies. (2025).

- <https://cnnews.chosun.com/client/news/viw.asp?nNewsNumb=20240861508&cate=C01&mcate=M1002>
- Taiwan's Energy. Taiwan's Energy Security and the Threat of a PRC Blockade. (2021). <https://globaltaiwan.org/2021/12/taiwans-energy-security-and-the-threat-of-a-prc-blockade/>
- The Culture of Taiwan. The Myth "De-Sinicization": Taiwan's Cultural Anxiety and the Rise of the Mainland's Cultural Confidence. (2024). <https://www.huaxia.com/c/2024/10/15/1968364.shtml>
- The National Committee of the Chinese People's Political Consultative Conference "Strengthen cross-strait industrial cooperation and create a cross-strait common market" remote consultation Chamber of Commerce Summary. (2023). <http://www.cppcc.gov.cn/zxww/2023/12/26/ARTI1703555218641247.shtml>
- Thomas J. Shattuck, & Benjamin Lewis. (2024). PLA in Taiwan Territory. Breaking the Barrier: Four Years of PRC Military Around Taiwan. <https://www.fpri.org/article/2024/10/breaking-the-barrier-four-years-of-prc-military-activity-around-taiwan/>
- tindakan provokatif tiongkok terhadap taiwan. Kelompok cendekiawan menyebut provokasi PLA terhadap taiwan sebagai "perang kognitif." (2021). <https://ipdefenseforum.com/id/2021/02/kelompok-cendekiawan-menyebut-provokasi-pla-terhadap-taiwan-sebagai-perang-kognitif/>
- United Front Department Work. The Fujian Provincial Committee of the Communist Party of China issued the "implementation Opinions on implementing the Regulations on the United Front Work of the Communist Party of China. (2022). <http://fj.people.com.cn/n2/2021/0627/c181466-34796132.html>
- Upaya Presiden Xi Jinping dalam melakukan reunifikasi daratan Cina. Taiwan tolak reunifikasi yang kembali disampaikan Presiden China. (2022). <https://m.antaranews.com/amp/berita/3183949/taiwan-tolak-reunifikasi-yang-kembali-disampaikan-presiden-china>
- U.S Intervention between China and Taiwan. What are the issues between the U.S., China, and Taiwan? Stanford scholar explains. (2022). <https://news.stanford.edu/stories/2022/08/explaining-issues-u-s-china-taiwan>
- William Matthews. (2025). China's efforts to protect Taiwan from US and Western intervention which is considered to have a separatist influence. <https://www.chathamhouse.org/2025/03/chinas-military-build-indicates-it-serious-about-taking-taiwan>
- William Yang. (2024). China-Taiwan Conflict. Taiwan Faces Foreign Policy Dilemma as China Turns Up Diplomatic Pressure. <https://www.voanews.com/a/taiwan-faces-foreign-policy-dilemma-as-china-turns-up-diplomatic-pressure/7445038.html>
- Y. Jiajun. (2022). If Xi Jinping does not resolve the Taiwan issue, the party will face pressure. Exclusive interview: How will Xi Jinping handle the Taiwan issue when he is firmly in power? <https://www.dw.com/zh>
- Yang Yangong, & Yang Shangkun's. (1991). The Taiwan issue under President Yang Shangkun. Looking back at chairman Yang Shangkun over the past century. <https://www.yskg.com/home/jjjs/index/catId/161.html>

- Yoga Suharman, & Sugiarto Pramono. (2021). Strategi Kebangkitan Ekonomi Tiongkok dan Pendekatan Long Cycle Transisi Kekuasaan Politik Dunia . Jurnal Ilmu Politik Hubungan Internasional, 8.
- Z. Yanbing. (2021). The great proposition of the times: follow the general trend, shoulder the great responsibility, follow the great path, shoulder the responsibility, and promote the great cause. <https://taiwan.cri.cn/20210105/8a919fe9-1f61-e547-3021-d4429d8ae3bb.html>
- Cross- Strait cultural exchange “same culture, same kinship” . Hunan holds cross-strait cultural exchange event “Shared Cultural and Family Ties”. . (2023). <https://m.hnswtzb.org/content/646755/90/13240190.html>
- Want Want, a Chinese company, supports the issue of peacefully reunification. Want Want boss and Taiwan’s richest man Tsai-eng meng: i am an upright Chinese. (2022). https://www.sohu.com/a/575149994_532789
- China used Fujian to carry out the unification movement. Opinions of the CPC Central Committee and the state Council on supporting Fujian in exploring new parts for cross-straits integrated development and building a cross- strait integrated development. (2023). https://www.mac.gov.tw/cn/News_Content.aspx?n=FF87AB3AC4507DE3&sms=4A22C80D8C659C54&s=7ACF9A15A1E577DB
- China provides Taiwan with “one country, two systems” and a special system. Excerpts from the Taiwan Affairs Office of the State Council press Conference. (2022). http://www.gwytb.gov.cn/xwdt/xwfb/xwfbh/202209/t20220914_12470167.htm
- The Taiwan issue is an issue tht must be resolved and cannot be left to the next generation. General Secretary Xi Jinping’s important speech on July 1 pointed out the direction for Taiwanwork in the new era. (2021). <http://theory.people.com.cn/n1/2021/0908/c40531-32221397.html>
- Fo Guang Shan religious group supports peaceful development of cross-strait relations. Master Hsing Yun: My consistent wish is peace across the Taiwan Straits.8(2023). https://view.inews.qq.com/k/20230206A08EVT00?web_channel=wap&openApp=false
- Mobilize relations to achieve the reunification of China and Taiwan . How should the people on both sides of the Taiwan Strait carry out exchange under the new situation?. (2021). https://www.icsd.tsinghua.edu.cn/info/lajd_/2002
- Poll of Taiwanese who oppose unification 2021 Taiwan official opinion poll 87.5% of people oppose “one country, two systems”. (2021). <https://www.dw.com/zh>
- Survei of Tawanese who oppose unification in 2021 polls showed that, 90% of Taiwanese consider themsleves Taiwanese and, 65% of Taiwanese are willing to fight to defend Taiwan2 (2021). <https://www.voachinese.com/a/Ninety-percent-of-people-in-taiwan-identify-as-taiwanese-20210811/5998637.html>
- Taiwanese people would rather maintain the status quo than unify. Why do more and more people in Taiwan want to" maintain the status quo forever"? (2024). <https://www.cw.com.tw/article/5130390>
- Taiwan rejects China’s reunification over Hong Kong issue1. The Hong Kong issue

- exacerbates the conflict between the US and China. People are worried about whether Beijing will Take action against Taiwan. (2020). <https://www.voachinese.com/amp/us-china-taiwan-hong-kong-20200529/5441395.html>
- Taiwan polls reject unification in 2024, recent polls show that most Taiwanese expect independence in the future. What does this mean for the 2024 presidential election? (2023). <https://www.voachinese.com/a/latest-poll-of-taiwan-peoples-attitude-towards-unification-and-independence-20230901/7251310.html>
- Taiwan question. The Taiwa issue under Liu Shaoqi's leadership. (2017). http://hprc.cssn.cn/gsyj/dfsztwdds/201708/t20170808_4147467.html
- Song Tao talks about Taiwan's election . Song Tao talks about Taiwan's election: peaceful development is the mainstream public opinion. . (2024). <https://www.cna.com.tw/news/acn/202402240192.aspx>
- The CPC supports the unification of China. The CPC Central Committee issued the Regulations on the Work of the United Front of the Communist. . (2021). https://www.gov.cn/zhengce/2021-01/05/content_5577289.htm
- The similarity of culture and ancestors has become a tool for Taiwan's unification efforts. Improving cultural identity: an effective way to build a strong sense of community for the Chinese nation. (2024). http://literature.cass.cn/ztzl/dsxxjy/202407/t20240703_5762535.shtml
- The Taiwan issue under Presidents Li Xinnian's leadership. Li Xinnian's new year's speech on the voice of the straits radio station.(1992). http://www.gwytb.gov.cn/zt/zylszl/speech/jhzt/201101/t20110123_1725383.htm
- The Taiwan issue under President Jiang Zemin. Jiang Zemin's historical contribution to the development of cross-strait relations. (2015). <https://www.dswxyjy.org.cn/n1/2019/0228/c423720-30923230.html>
- Laws and Regulations② | 《Anti-Section Law of the People's Republic of China》. Laws and Regulations② | 《The Republic of China anti sections and laws》. (2023). <https://m.voc.com.cn/xhn/news/202304/16886444.html>
- Yi said, that Taiwan's political dunamics will not change its history as part of China.
- WangYi: The historical trend that Taiwan will returns to the motherland is irreversible. (2022). https://www.mfa.gov.cn/wjdt_674879/wjbxw_674885/202208/t20220803_10733006.shtml
- The slogan of national rejuvenation in the white paper is to return Taiwan to Chinese sovereignty. Gathering the real power to promote the reunification of the motherland and national rejuvenation. (2022). http://kr.china-embassy.gov.cn/xwxx/202208/t20220812_10741882.htm
- Tsai Ing-wen asked China to respect the decision of the Taiwanese. Excerpts from the Taiwan Affairs Office of the State Council Press Conference (2020-01-15).(2020).http://www.gwytb.gov.cn/m/speech/202001/t20200115_12233157.htm
- Fajar Nugraha. 2022. “Respon Tiongkok Terhadap Tindakan Provokasi Taiwan Dan Amerika Serikat Terhadap Tiongkok. Tanggapi Provokasi, Tiongkok Gelar

- Latihan Serangan Di Sekitar Taiwan.”
- “Report at the 20th National Congress of the Communist Party of China. Xi Jinping: Hold the Great Banner of Socialism with Chinese Characteristics and Work Together to Build a Modern Socialist Country in an All-Round Way. .” 2022.
- “Tindakan Provokatif Tiongkok Terhadap Taiwan. Kelompok Cendekiawan Menyebut Provokasi PLA Terhadap Taiwan Sebagai ‘Perang Kognitif’ .” 2021.
- He, A. (2018). The Emerging Model of Economic Policy Making under Xi Jinping China’s Political Structure and Decision-making Process. *CIGI Papers*, 208, 44. https://www.cigionline.org/static/documents/documents/CIGI_Paper_No.208.pdf
- Husien, S. (2022). Richard Snyder’s Approach for Analyzing Decision-Making Process in Foreign Policy. *Journal for Political and Security Studies*, 5(2), 189–217. <https://doi.org/10.31271/jopss.10069>
- Putrawandi Karjaya, L., & Rizki, K. (n.d.). Analisis Perubahan Kebijakan Luar Negeri Tun
- Mahathir terhadap Investasi Megaproyek Tiongkok di Malaysia. In *IJGD: Indonesian Journal of Global Discourse* (Vol. 2, Issue 2).
- Septina, Y., Rizki, K., & Makhroja, M. N. (n.d.). *ALASAN PERUBAHAN KEBIJAKAN LUAR NEGERI SWISS TERHADAP RUSIA SEBAGAI RESPON INVASI RUSIA KE UKRAINA*.
- Swaine, M. (n.d.). *Paths to Crisis and Conflict Over Taiwan. Taiwanese respondents about Reunification. 76.6% of Taiwanese residents oppose unification....Lai Ching-te takes office 100 days later, cross-strait confrontation intensifies.* . (2025). <https://cnnews.chosun.com/client/news/viw.asp?nNewsNumb=20240861508&cate=C01&mcate=M1002>
- Bang Xiao. (2022). *Analysis: Why Taiwan is so important to Chinese leader Xi Jinping.* . <https://www.abc.net.au/chinese/2022-08-24/analysis-taiwan-and-xi-jinping-china-ccp-congress/101367290>.
- Han Duyuan. (2021). *Mengenai pespektif peradaban “Satu negara, dua sistem” dan signifikansinya pada masa kini.* . <http://www.calaw.cn/article/default.asp?id=14184>.
- Ho, M.-S. (n.d.). *“Taiwanese identity emerged as an insurgent gesture under Japanese colonialism, endured forcible silencing under postwar authoritarian rule, and then propelled Taiwan’s democratization on many fronts.” Desinicizing Taiwan: The Making of a Democratic National Identity.*
- Lan Easton. (2020). *Chairman Mao Wanted To Invade Taiwan.* . <https://nationalinterest.org/blog/buzz/chairman-mao-wanted-invade-taiwan-113746/>.
- Mainland Affairs Council. (2005). *The Official Position of the Republic of China (Taiwan) on the People’s Republic of China’s Anti-Secession (Anti-Separation) Law.* https://www.mac.gov.tw/en/News_Content.aspx?n=8A319E37A32E01EA&sms=2413CFE1BCE87E0E&s=D1B0D66D5788F2DE.
- Penentangan terhadap penyatuan dan pembentukan identitas Taiwan: dua set data mengungkap sikap masyarakat Taiwan terhadap isu “penyatuan atau*

- kemerdekaan*” dan “*identitas*” . (2020).
<https://taiwan.cri.cn/20200713/a48b5668-f900-b341-a554-487970b71608.html>
- Politic of China. (2024). *Analysis: Why Taiwan is so important to Chinese leader Xi Jinping*.
- Santoso, R. B., & Dermawan, W. (2021). Diplomasi Publik China Sebagai Upaya Mendukung One China Principle. *Sospol*, 7(1), 109–120.
<https://doi.org/10.22219/sospol.v7i1.15124>
- Shen, C. (2022). Why Can the Frail Status Quo in the Taiwan Strait be Preserved? Analyzing the Econ-political Synergy among China, Taiwan, and United States. *Modern Economics & Management Forum*, 3(6), 366.
<https://doi.org/10.32629/memf.v3i6.1103>
- The Problem of Taiwan. (2024). *Countries should stop sending the wrong signals to "Taiwan independence" separatist forces*. . The Problem of Taiwan
- The Taiwan Problem and Unification China in New Era*.(2022).https://www.gov.cn/zhengce/2022-08/10/content_5704839.htm.
- Yuzhou. (2021). *Xi nationalism is sweeping China, is it poison or panacea?* . <https://www.voachinese.com/a/voaweishi-20210720-voaio-nationalism-sweeps-china/5972689.html>.
- 驻埃尔比勒总领事刘军在伊拉克库尔德地区主流媒体发表署名文章《一个中国原则的核心：台湾不是一个独立国家，而是中国不可分割的一部分》2024.
http://erbil.chinaconsulate.gov.cn/zlsjhjwz/202412/t20241204_11538261.htm.